DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PERBENIHAN & PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) SURABAYA

2022

KATA PENGANTAR

Serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2020-2024 diawali dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) oleh masing-masing unit kerja Direktorat Jenderal Perkebunan, termasuk Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan.

Laporan Kinerja merupakan pertanggung jawaban kinerja suatu instansi/organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Beberapa peraturan yang mendasari Laporan Kinerja yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dan PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja BBPPTP Surabaya berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BBPPTP Surabaya Tahun 2022 ialah 1) terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Perkebunan dengan indikator kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya sebanyak 6 (enam) layanan atau 100% , 2) tersedianya benih tanaman perkebunan dengan indikator kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi Perbenihan BBPPTP Surabaya sebanyak 6 (enam) layanan atau 100%, dan 3) terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien dengan

indikator kinerja 3 Skala Likert (1-4) dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya pada 3 Skala Likert (1-4) yaitu 89,01 dengan kategori sangat baik.

Realisasi anggaran BBPPTP Surabaya pada Tahun 2022 adalah sebesar dari pagu Rp **69.408.829.572** atau mencapai 96,53% dari pagu DIPA/POK dengan capaian fisik sebesar 96,03%. Pelaksanaan Pembangunan perkebunan tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan kendala, namun dengan upaya percepatan dan penanganan serta langkah-langkah strategis permasalahan tersebut dapat diminimalisir dampaknya bagi pembangunan perkebunan. Hal ini bertujuan agar kegiatan pembangunan perkebunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Buku laporan kinerja (LAKIN) BBPPTP SUrabaya Tahun 2022 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga dokumen ini menjadi pertanggungjawaban kinerja BBPPTP Surabaya yang memadai.

Jombang, 09 Januari 2023

Kepala Balai,

Ir. Parlin Robert Sitanggang

NIP. 19641228 1992031002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Organisasi 3
C. Aspek Strategis Organisasi 6
1. Potensi Pembangunan Perkebunan 7
2. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Global 12
3. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Nasional 13
4. Aspek Sumber Daya Manusia 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA 15
A. Perencanaan Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024 15
1. Visi dan Misi BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024 16
2. Program dan Sasaran Program BBPPTP Surabaya 17
3. Kegiatan BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024 20
4. Kaitan Kegiatan dengan Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024 20
B. RENCANA KINERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2022 22
1. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan Dan Penyegar 22
2. Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Perkebunan 23
3. Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan 24

4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 25
C. PERJANJIAN KINERJA 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30
A. Capaian Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2022 30
B. Nilai Kinerja BBPPTP Surabaya.....57
C. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 58
1. Sasaran terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan 59
2. Sasaran tersedianya benih tanaman perkebunan 65
3. Sasaran terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien 70
D. Realisasi Anggaran Tahun 2022 78
BAB IV PENUTUP 85
LAMPIRAN 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BBPPTP Surabaya 3
Gambar 2. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024 18
Gambar 3. Hasil Taksasi Produksi Entres.....48
Gambar 4. Calon Kebun Benih Kakao 50
Gambar 5. Calon Kebun Benih kopi.....50
Gambar 6. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART 2022.....58
Gambar 7. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat BBPPTP Surabaya Tahun 2022.....71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Pendidikan 14
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPPTP Surabaya 2020-2024.....19
Tabel 3. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2022 22
Tabel 4. Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2022.....25
Tabel 5. Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2022 26
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan.....28
Tabel 7. Capaian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2022 Berdasarkan Perjanjian Kinerja.....31
Tabel 8. Hasil Penghitungan Kerapatan dan Viabilitas Spora Jamur Trichoderma spp. pada Pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium Penguji Mutu APH.....33
Tabel 9. Hasil Uji Mutu APH Produksi UPTD Wilayah Kerja BBPPTP Surabaya 34
Tabel 10. Jenis Isolat APH di BBPPTP Surabaya.....36
Tabel 11. Hasil Pengujian Mutu Benih Rekayasa Genetika Benih Tebu Rekayasa Genetika NXI 4T.....43
Tabel 12. Taksasi Produksi Entres Kako Konvensional Tahun 2022....45
Tabel 13. Taksasi Produksi Entres Kako mikro Tahun 2022 45
Tabel 14. Hasil Pemeriksaan Kebun Entres Kopi konvensional 46
Tabel 15. Hasil Pemeriksaan Kebun Entres Kopi Mikro 47
Tabel 16. Data Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih di Wilayah Kerja 53

Tabel 17. Produksi Benih Tanaman Perkebunan 56
Tabel 18. Target dan Capaian Sasaran Terkendalinya OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan 60
Tabel 19. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Rekomendasi Data dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan 61
Tabel 20. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan 64
Tabel 21. Target Dan Capaian Sasaran Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan 66
Tabel 22. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Rekomendasi Data dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan 67
Tabel 23. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Kegiatan Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan 69
Tabel 24. Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan Yang Efektif Dan Efisien.....70
Tabel 25. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya.....74
Tabel 26. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien.....77
Tabel 27. Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan BBPPTP Surabaya Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja.....78
Tabel 28. Serapan Dan Capaian Fisik Kegiatan BBPPTP Surabaya Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja.....79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Anggaran BBPPTP Surabaya Tahun 2022 86
Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Uji Mutu APH 93
Lampiran 3. Data Layanan Pengujian Mutu Formulasi Pestisida, Residu Pestisida dan Logam Berat Tahun 2022 95
Lampiran 4. Data Layanan Penyediaan Isolat APH 96
Lampiran 5. Data Layanan Identifikasi OPT Dan Rekomendasi Pengendalian OPT.....97
Lampiran 6. Data Layanan Penyediaan Data dan Informasi OPT 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. BBPPTP Surabaya mempunyai peranan strategis dalam memberikan kontribusi atas produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, juga menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat yang berat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan

produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan

konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat dan daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan. Undang-undang tersebut memasukkan bidang-bidang terkait sub sektor perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti tenaga kerja, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, pangan, lingkungan hidup dan pertanahan sebagai urusan wajib yang tidak terkait pelayanan. Implikasi penetapan urusan pertanian sebagai urusan pemerintah bersifat pilihan khususnya sub sektor perkebunan yang memiliki kekhasan komoditas sesuai potensi unggulan daerah akan membuka peluang negosiasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menentukan pembagian kewenangan sub sektor perkebunan yang tepat dan disesuaikan dengan kebijakan program, anggaran dan regulasi yang efektif dan efisien.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah, diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memadai. SAKIP yang memadai harus mengandung unsur Perencanaan Kinerja (Renstra, RKT, PK), Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pemanfaatan Informasi Kinerja. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu unsur

penting dalam SAKIP yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Format yang terdiri dari: 1) Bab I Pendahuluan; 2) Bab II Perencanaan Kinerja; 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja yang meliputi: (a) Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja; (b) Realisasi Anggaran yang digunakan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja; 4) Bab IV Penutup dan Lampiran. Di dalam Bab III juga membahas 1) capaian terhadap target tahun berjalan; 2) capaian kinerja dibandingkan dengan tahun lalu/beberapa tahun sebelumnya; 3) capaian kinerja terhadap Renstra dan PK; 4) membandingkan capaian kinerja dengan standar nasional; 5) analisis keberhasilan dan penyebab kegagalan; analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya; serta 7) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

B. Organisasi

Dalam menjalankan fungsinya BBPPTP Surabaya didukung oleh unsur Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabtan fungsional, sebagaimana Gambar 1.

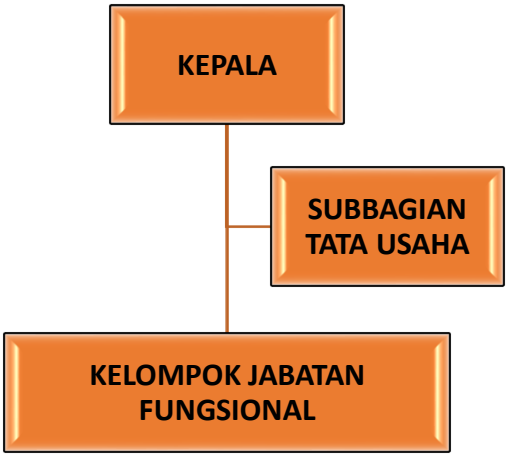

Gambar 1. Struktur Organisasi BBPPTP Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, maka BBPPTP Surabaya kedudukan, tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya yang selanjutnya disebut BBPPTP Surabaya merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. BBPPTP Surabaya secara teknis untuk bidang perbenihan dibina oleh Direktur Perbenihan Perkebunan, dan bidang proteksi dibina oleh Direktur Perlindungan Perkebunan. BBPPTP Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala.

b. Tugas Pokok

BBPPTP Surabaya mempunyai tugas (1) Melaksanakan Perbanyakan Benih; (2) Melaksanakan Pengembangan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan (3) Pengembangan Proteksi Tanaman, Pengembangan Kawasan Organik dan Identifiasi Komoditas spesifik, serta pemberian bimbingan teknis penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Laboratorium.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas di atas BBPPTP Surabaya, menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pelaksanaan Perbanyakan Benih
2. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi, Pengujian adaptasi (Observasi), Penilaian Pengujian manfaat dan kelayakan Benih.
3. Pelaksanaan pengembangan teknis dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan.
4. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi

5. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dan pengembangan kawasan organik
6. Pelaksanaan identifikasi komoditas perkebunan spesifik
7. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, teknik surveillance, teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, dan taksasi kehilangan produksi serta kerugian hasil
8. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan perkebunan
9. Pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, serta gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim.
10. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pengawasan, evaluasi dan pelepasan agens hayati.
11. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
12. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
13. Pengelolaan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
14. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
15. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; dan
16. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

C. Aspek Strategis Organisasi

Secara umum isu strategis sub sektor yang saat ini masih berlangsung, usaha perkebunan strategis nasional dalam kawasan maupun non kawasan serta komoditas unggul daerah saat ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat yang mencapai lebih dari 90%. Namun demikian, secara umum produktivitas tanaman perkebunan saat ini masih rendah, misalnya produktivitas kopi yang hanya 0,78 ton/ha, kakao 0,80 ton/ha, karet 1,2 ton/ha, kelapa sawit 3,1 ton/ha. Hal ini terjadi karena beberapa sebab antara lain kondisi tanaman yang sudah tua, penggunaan benih asalan, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) yang belum optimal. Bersamaan dengan itu, luas areal kebun rakyat yang perlu diremajakan/direhabilitasi karena tanamannya sudah tua dan/atau rusak sangat luas, yaitu mencapai 1,742 Juta ha atau 11,2% dari luas perkebunan rakyat strategis nasional (Renstra Ditjenbun, 2020-2024). Dalam pelaksanaan peremajaan tanaman perkebunan, bibit atau bahan tanam merupakan pintu masuk yang akan menentukan produktivitas dan kualitas produk usaha pekebun dalam jangka panjang atau satu musim tanam yang umumnya mencapai 25 tahun. Kesalahan penggunaan bahan tanam akan menimbulkan kerugian petani selama kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu, penyediaan bahan tanam merupakan prioritas pembangunan perkebunan, meskipun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan penyediaan input produksi lain, modal finansial, serta peningkatan SDM petani (jumlah dan kapabilitas).

Mencermati isu-isu strategis tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan di daerah melalui BBPPTP Surabaya sebagai representasi Pemerintah menaruh perhatian penuh *(concern)* terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan selalu berupaya memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi melalui program-program pembangunan perkebunan yang berorientasi pada peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan secara berkelanjutan. Aspek strategis organisasi ini didukung oleh adanya potensi pembangunan perkebunan yang ada, di tengah tantangan yang

dihadapi. Eksistensi organisasi BBPPTP Surabaya Direktorat Jenderal Perkebunan sangat strategis dalam mengoptimalkan dan memberdayakan potensi perkebunan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan tantangan yang dihadapi melalui kebijakan dan program pembangunan perkebunan.

1. Potensi Pembangunan Perkebunan

Pembangunan perkebunan ke depan akan tetap berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang signifkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu pilar ekonomi, perkebunan ditopang oleh beberapa potensi antara lain:

a. **Keanekaragaman hayati melimpah sebagai negara tropis.** Sebagai negara tropis maka Indonesia secara alami merupakan Kawasan dengan efektivitas dan produktivitas yang tinggi dalam pemanenan dan transformasi energi matahari menjadi bio-massa dan *feedstock bio-industry*. Kondisi ini juga dapat menjadi basis keunggulan kompetitif dalam *bioeconomic*;

b. **Pengembangan bio-economic.** Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dalam bentuk komoditas pangan dan perkebunan sebagai sumber pemanfaatan *bio-economic*. *Bio-economic* mengacu pada semua aktivitas ekonomi menggunakan sumberdaya hayati untuk menghasilkan bahan kimiawi, material dan bahan bakar nabati untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan *bio-economic* dipacu oleh semakin tingginya tuntutan atas produk pangan berkualitas termasuk *functional food*;

c. **Peningkatan permintaan dunia terhadap 4F Crops *(Food, Feed, Fiber and Fuel).*** Komoditas perkebunan di Indonesia memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan manusia (*food*), sumber pakan ternak (*feed*), kebutuhan serat pangan (*fiber*) untuk pupuk organik dan bahan bakar biomassa dan kebutuhan minyak nabati (*fuel*) untuk kebutuhan bahan bakar nabati (BBN). Peluang ini perlu dimanfaatkan

karena semakin tingginya permintaan dunia akan produk 4F Crops yang ramah lingkungan sebagai implikasi dari menipisnya cadangan fosil di dunia.

d. **Kecenderungan baru penghargaan atas jasa lingkungan dan jasa amenity.** Lahan perkebunan tidak hanya penghasil bahan makanan, serat dan energi tetapi juga mempunyai multifungsi yang menghasilkan jasa lingkungan dan jasa *amenity*. Jasa lingkungan dan jasa *amenity* lahan perkebunan antara lain penyedia sumber air tanah dan oksigen, pengendali banjir, pencegah erosi/longsor dan sedimentasi, mempertahankan suhu udara, mendaur ulang limbah, menjaga kualitas udara/ purifkasi, pengatur tata air dan menjaga keberadaan sumber daya air, memitigasi perubahan iklim, sumber keindahan dan kenyamanan, pelestari keanekaragaman hayati, pelestari budaya pedesaan, dan sebagainya.

e. **Perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi pertanian/perkebunan.** Perkembangan diseminasi teknologi kepada petani/pekebun lebih mudah dilakukan karena umumnya petani/pekebun tertarik kepada hal-hal yang bersifat inovatif, namun tingkat adopsi masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena produk yang dihasilkan dengan mengadopsi teknologi baru tidak mendapatkan insentif atau nilai tambah artinya harga yang diterima tidak berbeda jauh dengan harga produk tanpa teknologi baru.

f. **Ketersediaan sumber daya lahan dan kesesuaian agroekosistem.** Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Total luas daratan Indonesia sebesar 192 juta hektar, terbagi atas 123 juta hektar (64,6%) kawasan budidaya dan 67 juta hektar sisanya (35,4%) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya di daratan yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta hektar, meliputi lahan basah 25,6 juta hektar; lahan kering tanaman semusim 25,3 juta hektar dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta hektar. Sampai saat ini dari areal yang

berpotensi untuk pertanian, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta hektar sehingga masih tersisa 54 juta hektar yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian.

g. **Distribusi dan aksesibilitas pemanfaatan sumber daya air.** Ketersediaan sumber daya air nasional (*annual water resources*/AWR) masih sangat besar, terutama di wilayah barat, akan tetapi tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Sebaliknya di sebagian besar wilayah timur yang radiasinya melimpah dan curah hujan rendah (<1.500 mm per tahun) hanya terdistribusi selama 3-4 bulan. Total pasokan atau ketersediaan air wilayah (air permukaan dan air bumi) di seluruh Indonesia adalah 2.110 mm per tahun setara dengan 127.775 m3 per detik. Indonesia dikategorikan sebagai negara kelompok 3 berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya airnya yang membutuhkan pengembangan sumberdaya 25-100% dibanding kondisi saat ini.

h. **Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI).** SDI ini dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif perkebunan Indonesia yang merupakan pelaksana penggerak proses produksi dan pengembangan rantai nilai. Pengembangan SDI perkebunan harus memperhatikan beberapa hal agar mampu meningkatkan daya saing di tataran Internasional diantaranya: 1) pendidikan dan kemampuan/skills; 2) keberadaan usia SDI yang produktif; 3) adopsi inovasi dan teknologi; 4) kreativitas; 5) peluang pelatihan, penelitian, pemberdayaan dan pendidikan; 6) migrasi tenagakerja ke sektor lain; 7) ketimpangan pendapatan dan sosial ekonomi lainnya; 8) sosial budaya dan karakteristik SDI perkebunan; 9) ketersediaan sarana prasarana kerja dan lingkungan kerja; dan 10) aksesibilitas, konektivitas dan minat.

i. **Bonus Demografi.** Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi” yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk non usia kerja kepada penduduk usia kerja. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja

di Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerja menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

j. **Perkembangan struktur, perilaku dan kinerja pasar.** Perdagangan komoditas perkebunan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, terutama didorong oleh peningkatan rasio pendapatan masyarakat, peningkatan jumlah penduduk, adanya dukungan regulasi dan akses pasar yang semakin terbuka. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian/ perkebunan Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian/ perkebunan Indonesia.

k. **Momentum gerakan desentralisasi pemerintahan**. Pemanfaatan momentum gerakan desentralisasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi peluang besar bagi pembangunan perkebunan apabila diarahkan untuk pengembangan sistem politik perkebunan yang digerakkan oleh/dan berorientasi pada pekebun/petani kecil. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2000, peran pemerintah saat ini berubah menjadi fasilitator, stimulator atau promotor pembangunan pertanian/ perkebunan. Pembangunan pertanian/ perkebunan pada era otonomi daerah lebih mengandalkan kreativitas rakyat/ masyarakat pekebun di setiap daerah.

l. **Partisipasi masyarakat pekebun**. Paradigma pembangunan pada era otonomi daerah memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang secara dinamik dan kreatif didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan sehingga terjadi perimbangan kekuasaan (*power sharing*) antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan

menjadi sangat penting untuk mengendalikan hak pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang cenderung berpihak kepada pengusaha dengan anggapan bahwa kelompok pengusaha memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan nasional.

m. **Dinamika tata kelola dan reformasi birokrasi**. Kebijakan reformasi birokrasi secara nasional telah tercantum dalam Undang- Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang menyebutkan "pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya". Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah (1) modernisasi manajemen kepegawaian, (2) restrukturisasi, downsizing dan rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi, (3) rekayasa proses administrasi pemerintahan, (4) anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, serta (5) hubungan baru yang sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Adanya potensi permbangunan perkebunan tersebut merupakan modal penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya mengoptimalkan pembangunan perkebunan, maka pembangunan perkebunan dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kawasan. Pengembangan kawasan perkebunan sesuai dengan Permentan 18/2018 tentang kawasan pertanian berbasis korporasi, kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis maupun lokasi baru yang sesuai tipologi agroekosistem dan persyaratan budidaya bagi masing-masing jenis komoditas perkebunan. Kriteria khusus kawasan perkebunan mencakup berbagai aspek teknis

yang bersifat spesifik komoditas, baik untuk tanaman tahunan dan penyegar, tanaman semusim dan rempah. Kriteria khusus kawasan perkebunan, yaitu sebagai berikut:

a. Pengusaha perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha. Perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi
b. Pengusahaan perkebunan besar dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti-plasma, kerjasama kemitraan perkebunan rakyat-perusahaan mitra, kerjasama pengolahan hasil dan/atau bentuk-bentuk kerjasama lainnya
c. Arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya: kelapa sawit, dengan penerapan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), kakao dengan penerapan *sustainable cocoa* dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.

2. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Global

Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup Global Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup global terutama berkaitan dengan liberalisasi pasar global yang dapat diklasifikasikan yaitu:

a. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya)
b. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015)
c. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas)
d. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT)

e. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan)
f. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku)
g. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari globalisasi produksi dan pasar)

3. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Nasional

Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup sektor pertanian terutama berkaitan dengan kondisi pertanian secara umum dapat diklasifikasikan yaitu:

a. Penurunan minat generasi muda terhadap budidaya pertanian/ perkebunan (implikasi terbatasnya sumber daya insani (SDI) pertanian/perkebunan)
b. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lain atau dari satu komoditi menjadi komoditi lain
c. Pembangunan pertanian difokuskan pada pengembangan Kawasan dengan korporasi petani. Dalam pengembangan Kawasan dan korporasi akan dihadapkan pada pengoptimalan berbagai aspek, baik fisik maupun non fisik
d. Adanya anomali iklim yang patut diantisipasi dalam upaya pelaksanaan pembangunan perkebunan
e. Ketersediaan benih dan sarana produksi (implikasi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan) yang belum optimal
f. Keterbatasan, penurunan kualitas, status kepemilikan, persaingan pemanfaatan, degradasi dan konversi/ alih fungsi lahan (implikasi permasalahan umum sumber daya lahan berkelanjutan)

g. Peningkatan kemampuan pekebun dalam usaha agribisnis perkebunan
h. Kondisi tanaman tua dan tanaman dengan produktivitas rendah
i. Tuntutan penerapan konsep pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
j. Tuntutan pengaturan perizinan usaha perkebunan
k. Konflik dan gangguan usaha perkebunan (implikasi keamanan, kenyamanan berusaha serta penciptaan minat dan iklim investasi).

4. Aspek Sumber Daya Manusia

Pegawai BBPPTP Surabaya sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah sebanyak 117 orang. Data pegawai didasarkan pada Golongan Kepangkatan, dan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Pendidikan

No	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	5
3	III	1	24	54	0	6	0	0	5	0	0	90
4	IV	0	13	9	0	0	0	0	0	0	0	22
	Jumlah	1	37	63	0	9	0	0	6	1	0	117

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai BBPPTP Surabaya merupakan golongan II sebanyak 5 (lima) orang atau 4,28%, golongan III sebanyak 90 orang atau 76,92%, disusul golongan IV sebanyak 22 orang atau 18,80%.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024

Selama periode 2015-2019, sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja "NAWACITA" khususnya nawacita ke-6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Nawacita ke-6 ini mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

RPJMN tahun 2020-2024 mengusung tema pembangunan **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Tema pembangunan tersebut sekaligus menjadi Visi Presiden dalam pembangunan nasional tahun 2020-2024. Tema pembangunan ini dilaksanakan melalui 7 agenda pembangunan yang merupakan Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV tahun 2020-2024. Ketujuh PN tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Pertanian berkontribusi pada Program Nasional (PN) 1, yaitu "Penguatan Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas", dengan 2 (dua) Program Prioritas, yaitu: PP 3 (Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan) dan PP 6 (Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi). Untuk mewujudkannya, Direktorat Jenderal Perkebunan dan BBPPTP Surabaya sebagai UPT di daerah secara konkrit memberikan kontribusi pada Program Prioritas, "Nilai tambah dan daya saing industri:" Program Prioritas (PP) 3, "Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan" dan Program Prioritas (PP) 6, "Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi". Sasaran Program Peningkatan nilai tambah dan daya saing industri antara lain meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan dan terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan. Peningkatan kegiatan untuk padat karya dilakukan dengan fasilitasi kegiatan berupa pemberian upah (HOK) pada nursery pada kegiatan penguatan perbenihan perkebunan.

1. Visi dan Misi BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024

a. Visi

Dalam rangka mendukung visi Direktorat Perkebunan yaitu "Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia", maka BBPPTP Surabaya menetapkan visi tahun 2020- 2024 yaitu "Menjadi Balai yang Profesional dalam Melaksanakan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih serta Pengembangan dan Penyiapan Teknologi Proteksi dalam Mewujudkan Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing".

b. Misi

1) Mewujudkan Pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pengawasan benih secara cepat, tepat dan akurat;

2) Mewujudkan dukungan penyediaan benih tanaman perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan melalui pengembangan dan tata kelola nursery tanaman perkebunan yang professional;

3) Mewujudkan dukungan perlindungan perkebunan melalui inovasi teknologi proteksi yang ramah lingkungan dalam mengatasi gangguan OPT dan gangguan usaha perkebunan serta pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;

4) Mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas sebagai implementasi reformasi birokrasi kepada masyarakat melalui pelayanan data dan informasi serta dukungan teknis lainnya dalam bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; dan

5) Mewujudkan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai.

2. Program dan Sasaran Program BBPPTP Surabaya

BBPPTP Surabaya merupakan unit Eselon II Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian di daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan atas Program dan Sasaran Program unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dijelaskan pada Gambar 2.

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	%	80	80.50	81.00	81.50	82
		Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	%	80	45	45	45	45
		Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40	40	40	40	40
	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	1.8	1.82	1.85	2.00	2.10
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32.58	32.62	32.72	32.75	32.91
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	85	85	85	85

Gambar 2. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024.

Berdasarkan Gambar 2 Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki Kerangka Kinerja 2020-2024 yaitu program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Dukungan Manajemen. Sementara itu, BBPPTP Surabaya sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perkebunan di daerah melaksanakan program dan sasaran program tersebut dalam bentuk kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu program sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPPTP Surabaya 2020-2024

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SK-1	Penguatan Perlindungan Perkebunan						
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPPTP Surabaya	Layanan	6	6	6	6	6
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi	Layanan	6	6	6	6	6
	Jumlah akreditasi lab proteksi tanaman perkebunan	Akreditasi	1	1	1	1	1
	Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	Hari	27	27	26	25	24
	Penguatan Perbenihan Perkebunan						
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPPTP Surabaya	Layanan	6	6	6	6	6
	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan	Layanan	6	6	6	6	6
	Jumlah Akreditasi lab perbenihan sesuai standar internasional	Kreditasi	2	3	3	3	3
	Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	Hari	18	17	17	16	15
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan						
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP Surabaya) yang diberikan	Skala Likert (1-4	3	3	3	3	3
	Tingkat kepuasan layanan ASN BBPPTP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3

Setiap capaian indikator yang merepresentasikan tercapainya satu sasaran, berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pada akhirnya dapat menjadi tolak ukur capaian visi dan misi BBPPTP Surabaya.

Tabel 2 di atas menunjukkan target kinerja BBPPTP Surabaya untuk periode 2020-2024. BBPPTP Surabaya memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan yang capaiannya diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program. Setiap indikator kinerja sasaran program memiliki target tahunan yang harus dicapai. Capaian dari target indikator kinerja sasaran program tersebut merupakan cerminan capaian kinerja BBPPTP Surabaya pada tiap tahun pengukuran.

3. Kegiatan BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024

Berlandaskan pada Indikator Kinerja Utama, maka BBPPTP Surabaya pada tahun 2022 merumuskan kegiatan di tingkat UPT, yaitu:

a) Sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan
b) Produksi dan Penyediaan Benih Bermutu dan Berkelanjutan
c) Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi
d) Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan
e) Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati
f) Koordinasi pembinaan, monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
g) Pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan
h) Layanan Perkantoran
i) Layanan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
j) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
k) Inovasi Pelayanan Publik

4. Kaitan Kegiatan dengan Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024

Kaitan antara kegiatan pembangunan perkebunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dengan fokus kegiatan yang ditetapkan tercantum dalam Renstra Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan sebagai berikut:

a) Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

BBPPTP Surabaya melaksanakan kegiatan Program Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar oleh Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar. Program ini lebih diprioritaskan untuk peningkatan produksi melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan dan pemberian

pelayanan yang berkualitas. Fasilitasi dan pembinaan baik dukungan kegiatan, pembinaan/pengawalan/ pendampingan, regulasi dan pendanaan di daerah perlu didukung oleh Pemerintah Daerah setempat melalui SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap komoditas spesifik dan potensial di wilayah masing-masing. BBPPTP Surabaya melaksanakan program Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar terhadap pengembangan 4 (empat) komoditas unggulan melalui peningkatan produksi komoditas tanaman perkebunan berorientasi ekspor yaitu kopi, kakao, kelapa, dan jambu mete.

b) Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung program Direktorat Perbenihan Perkebunan Tahun 2020-2024 yaitu peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan, arah kebijakan umum Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024 yaitu:

1) Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
2) Fasilitas Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan

c) Penguatan Perlindungan Perkebunan

Sasaran kegiatan dukungan perlindungan perkebunan yaitu Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan

d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Sesuai tugas dan fungsi berdasarkan perubahan organisasi Kementerian Pertanian sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010 /8/ 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian serta adanya restrukturisasi program K/L melalui penyempurnaan output/outcome yang lebih terukur dalam kerangka arsitektur anggaran berbasis kinerja dan pendekatan konsep Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 menetapkan sasaran kegiatan beserta Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan.

B. RENCANA KINERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2022

Sasaran kegiatan utama BBPPTP Surabaya tahun 2022 adalah terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Perkebunan, tersedianya benih tanaman perkebunan, dan terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien, sedangkan alokasi anggaran per kegiatan dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)
567338	**BBPPTP Surabaya**	**71.904.253.000**
018.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**15.983.242.000**
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	**15.983.242.000**
018.05.EC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**55.921.011.000**
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	**32.936.850.000**
1779	Penguatan Perlindungan Tanaman Perkebunan	**2.781.983.000**
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	**20.202.178.000**

Sumber: DIPA BBPPTP Surabaya Tahun 2022

Kegiatan utama BBPPTP Surabaya dan dukungan anggaran tahun 2022 tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. **Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.936.850.000,-, dengan output sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	**32.936.850.000**
1777.RAI	**Sarana Pengembangan Kawasan**	**32.936.850.000**
1777.RAI.001	**Kawasan Kopi**	**9.736.200.000**
1777.RAI.001.051	Perluasan Tanaman Kopi	2.555.000.000
1777.RAI.001.054	Intensifikasi Tanaman Kopi	6.438.000.000
1777.RAI.001.055	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan	743.200.000
1777.RAI.002	**Kawasan Kakao**	**7.175.700.000**
1777.RAI.002.052	Peremajaan Tanaman kako	6.900.000.000
1777.RAI.002.055	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan	275.700.000
1777.RAI.005	**Kawasan Kelapa**	**5.441.700.000**
1777.RAI.005.051	Perluasan Tanaman Kelapa	10.602.344.000
1777.RAI.005.052	Peremajaan Tanaman Kelapa	2.825.056.000
1777.RAI.005.055	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan	2.014.300.000
1777.RAI.007	**Kawasan Jambu Mete**	**583.250.000**
1777.RAI.007.052	Peremajaan Tanaman Jambu Mete	445.500.000
1777.RAI.007.055	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan	137.750.000

Sumber: DIPA BBPPTP Surabaya, 2022

2. **Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Perkebunan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.781.983.000,-, dengan output yang dihasilkan adalah sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Perkebunan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	**2.781.983.000**
1779.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	160.349.000
1779.ABR.001.051	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	160.349.000
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	398.250.000
1779.CAG.001.054	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan	49.700.000
1779.CAG.002.051	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	348.550.000
1779.PDC	Sertifikasi Produk	1.629.209.000
1779.PDC.001.051	Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	1.298.900.000
1779.PDC.001.052	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan	330.309.000
1779.RAI	**Sarana Pengembangan Kawasan**	**594.175.000**
1779.RAI.001	**Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun**	**358.325.000**
1779.RAI.002	**Area Penangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan**	**235.850.000**

Sumber: DIPA BBPPTP Surabaya, 2022

3. **Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.202.178.000,-, dengan output sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi (Rp)
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	**20.202.178.000**
5890.BJA	**Penyidikan dan Pengujian Produk**	**1.069.668.000**
5890.BJA.001.051	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	729.668.000
5890.BJA.002.051	Pengujian Mutu Benih	340.000.000
5890.RBK	**Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**19.132.510.000**
5890.RBK.001	**Nursery**	**19.132.510.000**
5890.RBK.001.051	Pembangunan Nursery	9.995.905.000
5890.RBK.001.052	Operasional Nursery	6.307.249.000

Sumber: DIPA BBPPTP Surabaya, 2022

4. **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.983.242.000,- dengan output sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/Output	Alokasi
018.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**15.983.242.000**
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	**15.983.242.000**
1780.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**14.066.582.000**
1780.EBA.956	Layanan BMN	**273.300.000**
1780.EBA.962	Layanan Umum	**1.993.512.000**
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	**11.799.770.000**
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	**522.920.000**
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	522.920.000
1780.EBB.951.054	Pengadaan Kendaraan Bermotor UPT Pusat	34.000.000
1780.EBB.951.054.A	Pengadaan Kendaraan Dinas	34.000.000
1780.EBB.951.056	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran UPT Pusat	488.920.000
1780.EBB.951.056.A	Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium	470.620.000
1780.EBB.951.056.B	Pengadaan Meubelair Elektronik	18.300.000
1780.EBC	**Layanan Manajemen SDM**	**408.200.000**
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	**408.200.000**
1780.EBC.954.052	Pengelolaan Kepegawaian UPT Pusat	408.200.000
1780.EBC.954.052.A	Administrasi Kepegawaian	85.600.000
1780.EBC.954.052.B	Peningkatan Kapabilitas Pegawai	322.600.000
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	**985.540.000**
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	**584.140.000**
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	**221.400.000**
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	**180.000.000**

Sumber: DIPA BBPPTP Surabaya, 2022.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target sasaran kinerja serta indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcome) maupun keluaran (output).

Perjanjian Kinerja (PK) awal BBPPTP Surabaya Tahun 2022 ditandatangani pada Bulan Desember 2021 kemudian mengalami 2 kali perubahan yakni pada Bulan Mei 2022 dan Desember 2022. Perjanjian Kinerja (PK) sebagai penjabaran dari Rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan setiap tahunnya dan telah mengikuti Pedoman Permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai dukungan terhadap pencapaian kinerja pada PK, pada Tahun 2022 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana yang tertuang dalam DIPA/POK yang dikeluarkan pada bulan Desember 2020 dengan total anggaran sebesar Rp 72.092.426.000,-.

Selanjutnya pada bulan Mei 2022 melalui penambahan anggaran menjadi Rp 77.152.963.000,-. Perubahan anggaran terjadi kembali melalui refocusing pada bulan Desember 2022 dengan alokasi Rp 71.904.253.000,-.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan

No.	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
1.	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Perkebunan	1-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	6	Layanan
2.	Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan	2-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi Perbenihan BBPPTP Surabaya	6	Layanan
3.	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien	3-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	3	Skala likert (1-4)

Sumber: BBPPTP Surabaya, 2022.

Berdasarkan Tabel 8 tersebut dapat diuraikan bahwa:

a. Target terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Perkebunan dengan indikator kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya adalah 6 (enam) layanan.

b. Target tersedianya Benih Tanaman Perkebunan dengan indikator kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi Perbenihan BBPPTP Surabaya adalah 6 (enam) layanan.

c. Target terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya adalah 3 (tiga) skala likert (1-4).

Selain melaksanakan PK yang telah menjadi kontrak kerja Kepala BBPPTP Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan, untuk mendukung Program Kerja pada unit Eselon I Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian,

BBPPTP Surabaya turut serta sebagai pelaksana kegiatan **Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar**. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di daerah yang menjadi wilayah kerja BBPPTP Surabaya dilaksanakan melalui peningkatan produksi komoditas tanaman perkebunan berorientasi ekspor berupa kopi, kakao, kelapa, dan jambu mete.

Perjanjian Kinerja (PK) BBPPTP Surabaya tahun 2022 dari PK awal hingga perubahan ke-3 pada bulan Desember 2022 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan hanya terjadi pada anggara, sedangkan, sedangkan Sasaran dan Indikator Kinerja tidak mengalami perubahan. Perubahan PK terjadi karena adanya pergantian Kepala BBPPTP Surabaya dan refocusing anggaran.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2022

Capaian kinerja organisas disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pimpinan atas nama organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis yang realistis dan formal sesuai aturan yang berlaku.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Setiap akhir tahun anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Capaian Kinerja BBPPTP Surabaya tahun 2022 sesuai perjanjian kinerja antara Kepala BBPPTP Surabaya dengan Direktur Jenderal Perkebunan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2022 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	Kriteria Keberhasilan
1.	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Perkebunan	1-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	6	Layanan	6	Layanan	100 %	Berhasil
2.	Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan	2-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi Perbenihan BBPPTP Surabaya	6	Layanan	6	Layanan	100 %	Berhasil
3.	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien	3-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	3	Skala likert (1-4)	3	Skala likert (1-4)	100 %	Berhasil

Sumber: BBPPTP Surabaya, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Ditjen BBPPTP Surabaya tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Sasaran Kegiatan terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan** dengan indikator kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya terealisasi 100% yaitu sebanyak 6 Layanan dari target 6 layanan dengan (berhasil). Layanan yang diselelenggarakan adalah sebagai berikut:

   a) **Pengujian mutu Agens Pengendali Hayati (APH)**

   Kegiatan uji mutu APH *(Lampiran 2)* dalam pelaksanaannya mencakup dua kegiatan, yaitu kegiatan **uji banding antar laboratorium** dan **kegiatan *quality control* dan bimbingan teknis**.

   1) Kegiatan uji banding antar laboratorium bertujuan menilai unjuk kerja laboratorium penguji mutu APH, meningkatkan

kompetensi atau kemampuan laboratorium peserta uji banding, dan untuk memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai laboratorium penguji mutu APH yang terakreditasi. Kegiatan uji banding antar laboratorium APH akan dilaksanakan di 13 Laboratorium yaitu BBPPTP Surabaya, BBPPTP Medan, BBPPTP Ambon, BPTP Pontianak, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Jatisari, Balai Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Balai Proteksi Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Provinsi Jawa Tengah, Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan, UPT Perbenihan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman Bantul Yogyakarta, serta Laboratorium Pengamatan Hama dan penyakit Tanaman, UPT Perlindungan Tanaman pangan dan Holtikultura Riau. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei 2022, dengan ruang lingkup pengujian kerapatan spora, dan viabilitas *Trichoderma* spp.

Realisasi pelaksanaan kegiatan uji banding antar laboratorium sampai bulan Desember 2022 adalah uji homogenesitas sampel uji banding, pelaksanaan uji banding antar laboratorium penguji mutu APH, dan uji stabilitas sampel uji banding. Hasil perhitungan kerapatan spora dan viabilitas disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Penghitungan Kerapatan dan Viabilitas Spora Jamur *Trichoderma* spp. pada Pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium Penguji Mutu APH

No	Nama Laboratorium	Kerapatan Spora	Viabilitas
1	UPTD DIY	$3,6 \times 10^8$	100 %
2	LPHP Pandak	$3,3 \times 10^8$	100 %
3	NTB	$2,2 \times 10^8$	88 %
4	BBPPTP Medan	$1,1 \times 10^8$	100 %
5	LPHP Riau	$3,2 \times 10^8$	56,8 %
6	BBPOPT Jatisari	$4,1 \times 10^8$	98,9 %
7	BPTP Pontianak	$1,7 \times 10^8$	95,22 %
8	Balittas	$3,2 \times 10^8$	100 %
9	BBPPTP Ambon	$4,7 \times 10^8$	100 %
10	BPTP Pasirjati	$1,5 \times 10^9$	100 %
11	UPTD Jateng	$7,5 \times 10^8$	100 %
12	UPTD NTT	$1,3 \times 10^9$	62,3 %
13	BBPPTP Surabaya	$2,7 \times 10^8$	97,5%

Hasil analisis data uji banding pada pengujian kerapatan spora Trichoderma spp menunjukkan semua hasil pengujian laboratorium peserta memuaskan. Sedangkan pada pengujian viabilitas spora, terdapat 2 (dua) data laboratorium yang tidak diikutsertakan dalam uji lanjut (Robust Z Score), yaitu LPHP Riau dan UPTD NTT (L5 dan L12), karena nilai G3 hitung lebih besar daripada G3 tabel. Hasil analisis uji lanjut, terdapat 1 (satu) laboratorium questionable, yaitu laboratorium BPTP Pontianak (L7) dan 1 (satu) laboratorium outlier, yaitu laboratorium NTB (L3).

2) Realisasi pelaksana kegiatan *quality control* dan bimbingan teknis hingga bulan Desember 2022 adalah pelaksanaan pengambilan sampel APH di BPP Jawa Barat, BPTPHP Jawa Tengah, BPTP Daerah Istimewa Yogyakarta, dan BPTPH Perkebunan Bali. Sampel APH yang dikirim adalah sampel APH dari BP2TP NTB dan UPTD PKDLHP NTT, dan UPT yang tidak mengirimkan sampel produksi APH adalah Propinsi Banten. Seluruh sampel APH telah diuji kualitas/mutunya di Laboratorium Mikologi BBPPTP

Surabaya. Data hasil uji mutu APH disajikan pada Tabel 11. Pada kegiatan bimbingan teknis *quality control* dan teknik isolasi jamur APH dan patogen dilaksanakan kepada petugas laboratorium BPTPH Perkebunan Bali.

Tabel 11. Hasil Uji Mutu APH Produksi UPTD Wilayah Kerja BBPPTP Surabaya

No	Pemilik	Jenis APH	Media	Hasil Uji Laboratorium	
				Spora/ml	Viabilitas (%)
1.	BPTPHP Jawa Tengah	*Beauveria* sp.	Jagung	$2,41 \times 10^8$	95,23
2.	BPTPHP Jawa Tengah	*Trichoderma* sp.	Jagung	$0,83 \times 10^7$	100
3.	BPTPHP Jawa Tengah	*Metarhizium* sp.	Jagung	$1,33 \times 10^7$	24,10
4.	BPTPHP Jawa Tengah	*Beauveria* sp.	Kaolin	$5,42 \times 10^8$	0
5.	BPTPHP Jawa Tengah	*Trichoderma* sp.	Kaolin	$5,00 \times 10^6$	67,00
6.	BPTPHP Jawa Tengah	*Metarhizium* sp.	Kaolin	$1,00 \times 10^6$	45,83
7.	BPTP DIY	*Beauveria* sp.	Jagung	$2,92 \times 10^6$	100
8.	BPTP DIY	*Trichoderma* sp.	Jagung	$2,67 \times 10^7$	88,33
9.	BPTP DIY	*Metarhizium* sp.	Jagung	$1,25 \times 10^7$	96,46
10.	BPP Pasir Jati Jawa Barat	*Beauveria* sp.	Jagung	$4,11 \times 10^7$	88,03
11.	BPP Pasir Jati Jawa Barat	*Metarhizium* sp.	Jagung	$1,58 \times 10^7$	77,70
12.	BPP Pasir Jati Jawa Barat	*Trichoderma* sp.	Jagung	$6,75 \times 10^7$	96,11
13.	UPTD LPTP Bali	*Trichoderma* sp.	PDA kentang	$1,75 \times 10^9$	97,20
14.	UPTD LPTP Bali	*Trichoderma* sp.	PDA instan	$1,37 \times 10^9$	92.80
15.	UPTD LPTP Bali	*Trichoderma* sp.	PDA campuran	$3,17 \times 10^8$	98,48
16.	UPTD LPTP Bali	*Trichoderma* sp.	Beras	$2,50 \times 10^8$	100
17.	UPTD PKDLHP NTT	*Beauveria* sp.	Beras	$2,83 \times 10^8$	91,66
18.	UPTD PKDLHP NTT	*Trichoderma* sp.	Beras	$1,75 \times 10^8$	100
19.	BPTP NTB	*Beauveria* sp.	Jagung	$1,08 \times 10^7$	98,07
20.	BPTP NTB	*Trichoderma* sp.	Jagung	$1,67 \times 10^8$	100

Penyerapan anggaran kegiatan sampai bulan Desember 2022 sebesar 99,33% dan untuk penyerapan fisiknya sebesar 100%.

b) Pengujian mutu formulasi pestisida, residu pestisida dan logam berat

Layanan pengujian mutu formulasi pestisida, residu pestisida dan logam berat bertujuan untuk menguji mutu, ada tidaknya residu pestisida, cemaran logam berat pada produk perkebunan serta

mengawal hasil perkebunan agar memenuhi Batas Minimum pada logam berat dan residu pestisida. Mutu formulasi pestisida yang diuji antara lain formulasi pestisida berbahan aktif permetrin, deltametrin, sipermetrin, klorpirifos, diazinon, lamda sihalotrin dan alfa sipermetrin. Sedangkan uji residu pestisida dan logam berat disesuaikan dengan komoditi perkebunan yang berada pada kabupaten di wilayah kerja BBPPTP Surabaya.

Realisasi pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel uji mutu formulasi pestisida, residu pestisida dan logam berat hingga pada tahun 2022 adalah pengambilan contoh produk pestisida dan produk perkebunan di Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Sleman.

Seluruh contoh yang diambil dari beberapa kabupaten di wilayah kerja BBPPTP Surabaya tersebut juga sudah dilaksanakan pengujian dengan menggunakan UPLC/MS/MS untuk screening dan analisa kuantitatif residu pestisida. Untuk contoh pestisida berbahan aktif deltametrin, sipermetrin, β-siflutrin, permetrin, profenofos, diazinon, λ-sihalotrin, alfametrin, dimetoat dan klorpirifos menggunakan GC sedangkan untuk contoh berbahan aktif karbofuran, karbaril, diuron, dan imidakloprid menggunakan HPLC/UV-Vis. Jumlah keseluruhan contoh residu pestisida adalah 25 contoh. Jumlah keseluruhan contoh residu logam berat adalah 25 contoh. Jumlah keseluruhan contoh mutu pestisida adalah 28 contoh.

Contoh residu pestisida yang mengandung klorpirifos 1 contoh, profenofos 2 contoh, profenofos di bawah LOQ 3 contoh, malation di bawah LOQ 1 contoh, ametrin 4 contoh. Contoh mutu pestisida yang memenuhi syarat adalah 18 contoh dari 28 contoh. Contoh logam berat yang mengandung logam berat kadmium (Cd)

ditemukan pada 5 contoh dan di bawah LOQ ditemukan pada 4 contoh. Pengujian mutu formulasi pestisida, residu pestisida dan logam berat tahun 2022 terdapat pada lampiran 3.

c) Layanan penyediaan isolat Agens Pengendali Hayati (APH)

BBPPTP Surabaya menyediakan beberapa isolat APH yang bisa didapatkan oleh masyarakat sesuai dengan tarif PNBP yang berlaku. Isolat APH yang tersedia merupakan isolat dari golongan jamur dan bakteri (Tabel 12).

Tabel 12. Jenis Isolat APH di BBPPTP Surabaya

No.	Jenis APH	
1.	Jenis APH Golongan Jamur	Beauvaria sp.
		Metarhizium sp.
		Tricoderma sp.
		Fusarium
2.	Jenis APH Golongan Bakteri	*Pseudomonas fluorescens*
		Bacillus sp.
		Coryne
		Serratia sp.
		Ralstonia solani
		Streptomyces

Tahun 2022 BBPPTP Surabaya telah memenuhi permintaan terhadap layanan penyediaan isolat APH sebanyak 467 tube dan 3 cawan petri APH *(lampiran 4)*. Selain jenis APH pada Tabel 12, BBPPTP Surabaya juga menerima layanan penyediaan APH lain sesuai dengan ketersediaan.

d) Layanan penyediaan formulasi APH dan pupuk hayati

Layanan penyediaan formulasi APH dan pupuk hayati saat ini belum dapat disediakan untuk masyarakat umum, dikarenakan tarif layanan penyediaan formulasi APH dan pupuk hayati belum terdapat dalam tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. BBPPTP Surabaya telah melakukan pengajuan usul agar layanan

penyediaan formulasi APH dan pupuk hayati dapat segera ditetapkan tarif PNBPnya oleh Kementerian Keuangan. Namun demikian, BBPPTP Surabaya tetap memproduksi formulasi APH dan pupuk hayati yang digunakan untuk berbagai keperluan internal BBPPTPT Surabaya seperti bimtek pengendalian OPT kepada petani.

e) Layanan identifikasi OPT dan rekomendasi pengendalian OPT

Pada tahun 2022 layanan identifikasi OPT dan rekomendasi pengendalian OPT terhadap OPT pada tanaman kelapa, tebu, dan tembakau sebanyak 7 (tujuh) layanan sebagaimana pada *lampiran 5*.

1) layanan identifikasi dan rekomendasi pengendalian OPT *Artona catoxantha* (ulat pemakan daun kelapa) pada tanaman kelapa dilaksanakan di Kabupaten Lumajang

2) layanan identifikasi dan rekomendasi pengendalian OPT Tebu di lapang oleh dokter tanaman dilaksanakan di Kabupaten Kediri, dan

3) layanan identifikasi dan rekomendasi pengendalian OPT Tembakau dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro dan Gresik.

f) Layanan penyediaan data dan informasi OPT

Layanan penyediaan data dan informasi OPT bertujuan untuk menyediakan data dan informasi OPT perkebunan bagi pengguna jasa yang membutuhkan, baik itu petani secara khusus maupun masyarakat umum. Layanan penyediaan data dan informasi OPT termasuk dalam kegiatan Pelayanan Teknis

Pengelolaan OPT Perkebunan melalui **Sistem Layanan Dokter Tanaman** (SINANDA).

Pemberian layanan informasi OPT/ konsultasi telah dilaksanakan sebanyak 25 (dua puluh lima) layanan dengan pengguna jasa dari mahasiswa dan petani yang disajikan pada *lampiran 6*.

2. **Sasaran kegiatan tersedianya benih tanaman perkebunan** dengan indikator kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi Perbenihan BBPPTP Surabaya terealisasi 100% yaitu sebanyak 6 layanan dari target 6 layanan (berhasil). Layanan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

   a) **Sertifikasi benih tanaman perkebunan di wilayah kerja**

      1) Tujuan sertifikasi benih perkebunan adalah untuk:
         (a) Menjaga kemurnian varietas;
         (b) Memelihara mutu benih;
         (c) Memberikan jaminan kepada pengguna benih; dan
         (d) Memberikan legalitas kepada produsen benih.
      2) Sasaran kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun Anggaran 2022, target benih diperiksa tahun 2022 sejumlah 11.590.000 batang.
      3) Lokasi Kegiatan
      4) Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Produsen Benih / Pelaku Usaha yang diajukan ke BBPPTP Surabaya. Selama tahun 2022 Produsen yang mengajukan Sertifikasi adalah sebagai berikut:
         (a) CV. Lang Buana Blitar Jawa Timur;
         (b) CV. Joyo Rosan Kediri Jawa Timur;

(c) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Bogor (KP.Muktiharjo, Pat Jawa Tengah);
(d) Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang Jawa Timur;
(e) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Indonesia Jember Jawa Timur;
(f) CV. Auliya Indoraya, Luwu Sulawesi Selatan;
(g) CV. Indonesia Hijau, Jember Jawa Timur;
(h) Asosiasi Petani Pribumi Nusantara, Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
(i) Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta (Blitar, Jawa Timur);
(j) Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta (Rembang, Jawa Tengah); dan
(k) PG. Rajawati (PG. Krebet Baru) Malang;
(l) Puslit Gula PTPN X Kediri
(m) PT. Cikal Abhipraya Nusantara Garut
(n) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon
(o) CV. Budi Jaya Sejati, Jember
(p) CV. Indah Irama Bangsa, Enrekang
(q) CV. Sukses Tani Kebumen
(r) CV. Sumber Agung, Kebumen
(s) CV. Putra Dayak Mandiri, Luwu Timur
(t) PT. Citra Nurani Nusantara, Bulukumba

5) Capaian Kegiatan
   (a) Komoditas yang diajukan selama Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

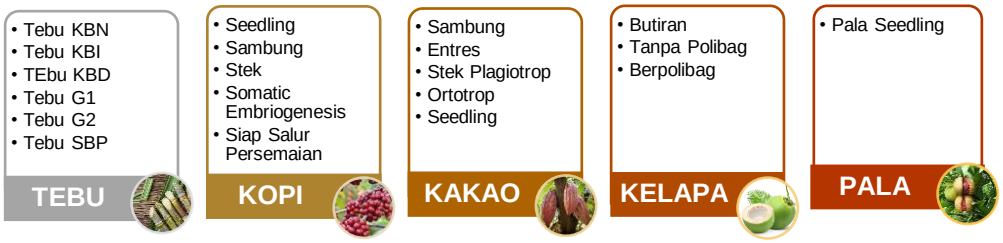

WIJEN **CENGKEH** **LADA** **NILAM**

KAPAS **TEMBAKAU** **ROSELLA**

6) Hasil Sertifikasi selama Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

   a) Jumlah permohonan sertifikasi selama Tahun 2022 adalah sejumlah 74 permohonan dari 19 podusen / penangkar. Sertifikat yang telah terbit sejumlah **487 Sertifikat Mutu Benih.**

   b) Pada Tahun 2022 target pemeriksaan lapang sejumlah 11.590.000 batang. Pada Tahun 2022 sertifikasi benih tanaman perkebunan diperoleh hasil sejumlah **17.822.802 batang diperiksa**.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan sertifikasi mutu benih tersaji pada Grafik 1.

Grafik 1. Rekapitulasi Hasil Sertifikasi Mutu Benih Perkebunan Tahun 2022

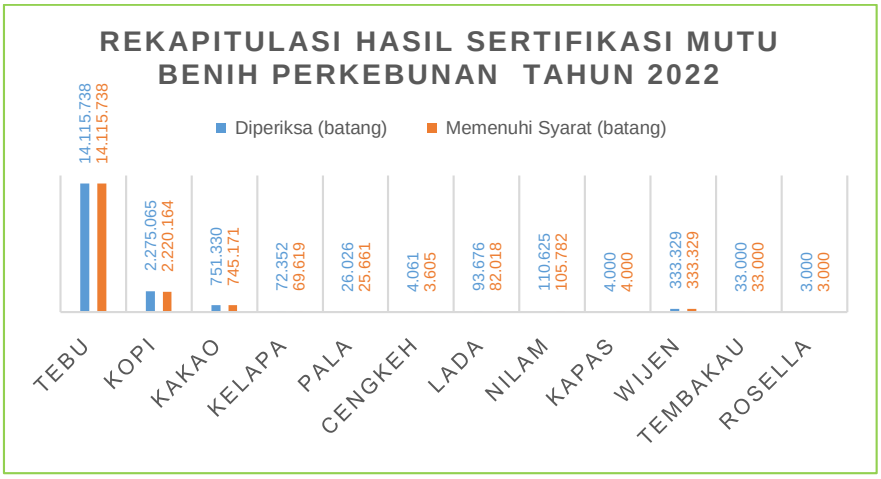

Kegiatan sertifikasi pada Tahun 2022 telah dilaksanakan pada komoditi beberapa komoditi perkebunan dan realisasi total benih yang telah disertifikasi Seksi Pelayanaan Teknis dan Indormasi Bidang Perbenihan adalah 17.822.802 batang. Dapat disimpulkan bahwa target sertifikasi tahun 2022 tercapai dengan persentase 150%.

Grafik 2. Target Capaian dan Realisasi Sertifikasi

Jumlah produsen yang mengajukan sertifikasi pada tahun 2022 adalah sejumlah 19 produsen. Jumlah permohonan sejumlah 74 permohonan, dan jumlah Sertifikat mutu benih sejumlah 487 sertifikat mutu benih. Perbandingan

Jumlah Produsen, Permohonan Sertifikasi dan Sertifikat dijabarkan pada Grafik 3.

Grafik 3. Perbandingan Jumlah Produsen, Permohonan Sertifikasi dan Sertifikat

c) Sesuai dengan Pagu Anggaran Sertifikasi sejumlah Rp 204.218.000,- selama tahun 2022 Anggaran yang terserap sejumlah Rp 202.871.981,- atau Prosentase penyerapan selama tahun 2022 sejumlah 99.341 %.

7) Kendala

Tidak ada kendala dalam Ketepatan Realisasi Layanan Kegiatan Sertifikasi Data lama pembuatan sertifikat diperoleh berdasarkan data waktu / tanggal pelaksanaan sertifikasi dan waktu tanggal sertifikat selesai dibuat. Standar waktu pembuatan sertifikat adalah 12 hari kerja. Berdasarkan data Tahun 2022 diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan waktu/lama pembuatan sertifikat (hari), namun selama Tahun 2022 lama pembuatan sertifikat tidak ada yang melebihi dari 12 hari.

b) Pengujian mutu benih laboratorium

Capaian hasil selama Tahun 2022, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Koordinasi tim PJ terkait rencana kegiatan dengan produsen-produsen dan lembaga penelitian tanaman perkebunan.
2) Kegiatan yang sudah di lakukan adalah pengujian mutu benih tanaman rekayasa genetika tebu yang sudah dilepas yaitu Tebu NXI – 4T yang didapatkan dari Puslit Sukosari PTPN XI, Kab. Lumajang – Jawa Timur.
3) NXI-4T merupakan varietas tebu baru hasil perakitan melalui proses transformasi genetika menggunakan bakteri Agrobacterium temefaciens yang di lakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara XI
4) Pengujian mutu benih rekayasa genetika dilaksanakan pada benih tebu rekayasa genetika NXI 4T dengan jenjang Kebun Benih Induk (KBI) dan Kebun Benih Nenek (KBN) sebagaimana pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Pengujian Mutu Benih Rekayasa Genetika Benih Tebu Rekayasa Genetika NXI 4T

PARAMETER	KBN	KBI
DAYA BERKECAMBAH	83%	88%
KECEPATAN TUMBUH	28,8%Kn.etmal	27,8 %Kn/etmal
KESEREMPAKAN TUMBUH	83%	88%

5) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas benih introduksi antara lain varietas atau klonnya, mutu genetis, mutu fisiologis, mutu fisik dan faktor lingkungan tumbuh yang sangat mempengaruhi dari kualitas benih.

c) Pengawasan sumber benih

1) Tujuan

Kebun-kebun benih sumber yang mempunyai peran sangat penting untuk menjamin mutu benih yang akan diedarkan kepada pengguna/konsumen, sehingga pengawasan terhadap kebun-kebun benih sumber harus dilakukan secara

periodik, adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

(a) Mengetahui tingkat kemurnian varietas yang ditanam sesuai SK penetapan kebun benih sumber.
(b) Mengetahui tingkat pemeliharaan kebun benih sumber terhadap tanaman induk, tanaman penaung dan lingkungan sekitar kebun.
(c) Mengetahui tingkat penyerapan teknologi dalam produksi benih on farm dan off farm.
(d) Mengetahui tingkat produksi kebun benih sumber.
(e) Menentukan tingkat kelayakan kebun sumber benih sebagai dasar untuk perbaikan kebun benih sumber.
(f) Memberikan pembinaan terhadap kebun sumber benih pada kegiatan on farm sampai off farm.
(g) Memberikan rekomendasi ke Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan untuk meninjau kembali SK Penetapan Kebun benih sumber untuk kebun sumber benih yang berdasarkan hasil pemeriksaan sudah tidak memenuhi syarat sebagai benih sumber.
(h) Memberikan legalitas terhadap mutu benih melalui penerbitan sertifikat atau surat keterangan mutu benih sumber.

2) Sasaran

Sasaran pengawasan kebun benih sumber adalah:

Kebun - kebun benih sumber kopi, kakao dan Entres di 16 (enam belas) wilayah kerja (wilker) BBPPTP Surabaya yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat keputusan penetapan sebagai benih sumber oleh Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal Perkebunan.

3) Capaian Kegiatan

(a) Pengawasan Kebun Benih Sumber Entres Kakao

Berdasarkan pengamatan kebun entres di lapangan, didapati hasil taksasi produksi entres sebagai berikut:

Tabel 14. Taksasi Produksi Entres Kako Konvensional Tahun 2022

Entres Kakao Konvensional

Produsen	Klon	Blok	Taksasi Produksi Entres
Puslitkoka Indonesia KP. Kaliwining	MCC 02	D6	147.848
	Sulawesi 1	C2-3	384.696
	MCC 02	C5	232.553
	Jumlah		***756.097***
PTPN XII	DR 2	Afdeling Besaran	521.244
	Jumlah		***521.244***
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Sulawesi 1	I	16.190
	MCC 02	II	23.005
	Jumlah		***78.391***

Tabel 15. Taksasi Produksi Entres Kako mikro Tahun 2022

Entres Kakao Mikro

Produsen	Klon	Blok	Taksasi Produksi Entres
Puslitkoka Indonesia KP. Kaliwining	Sulawesi 1	C 16 A	196.543
	Sulawesi 1	C 16 B	138.041
	Sulawesi 2	C 16 A	214.117
	MCC 02	C 16 A	274.476
	MCC 02	C 16 B	239.449
	Jumlah		***1.062.626***

(1) kebun entres mikro kakao KP. Kaliwining Jember belum sesuai dengan kepmentan Nomor 25/Kpts/KB.020/5/2017 tentang Pedoman, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.)

(2) Kebun entres kakao Bali Afdeling Semampir populasi belum memenuhi syarat dan perlu dilakukan pemurnian ulang kembali sehingga tidak diterbitkan surat keterangan kelayakan.

(3) Peluang untuk pemanfaatan entres kakao mulia masih cukup besar karena hanya ada di PTPN XII, Puslitkoka Indonesia dan UPT Dinas Pertanian Bali;

(b) Pengawasan Kebun Benih Sumber Entres Kopi

Berdasarkan pengamatan kebun entres di lapangan, didapati hasil sebagaimana pada Tabel 16 dan Tabel 17.

Tabel 16. Hasil Pemeriksaan Kebun Entres Kopi konvensional

Entres Kopi Konvensional

Produsen	Klon	Luas (Ha)	Taksasi Produksi Entres
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	BP 358	0,812	7.088
	BP 42		14.511
	SA 237		10.906
	Jumlah	***1,252***	***32.505***

Tabel 17. Hasil Pemeriksaan Kebun Entres Kopi Mikro

Entres Kopi Mikro			
Produsen	**Klon**	**Blok**	**Taksasi Produksi Entres**
Puslitkoka Indonesia KP. Kaliwining	Sehasence	C 25	61.326
	Sintaro 1	C25	4.509
	Sintaro 2	C25	37.665
	Sintaro 3	C25	6.183
	BP 939	C 23	537.993
	BP 936	C 23	339.012
	BP 358	C 23	230.148
	BP 534	C 23	583.560
	BP 42	C 23	221.904
	SA 237	C 23	177.930
	BP 409	C 23	200.640
	Andungsari 2K	D 16	3.875
	Sigararutang	C 24	200.547
	Andungsari 1	C 24	146.085
	BP 308	C 34	238.965
	Jumlah		***2.990.342***

(1) Kebun Entres Kopi Konvensional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Klon BP 308 seluas 0,440 Ha dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kebun Entres Kopi dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai sumber entres klon BP 308 karena potensi produksi entres kopi BP 308 sejumlah 66.999 entres.

(2) Untuk klon BP 288 dan BP 436 dari kebun entres mikro kopi milik KP. Kaliwining Puslitkoka Indonesia dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan kebun entres mikro kopi karena tidak dapat digunakan sebagai kebun benih sumber entres mikro dikarenakan mengalami kerusakan dan pertumbuhan tidak optimal.

(c) Pengawasan Kebun Benih Sumber Kopi

Berdasarkan pengamatan kebun entres di lapangan, didapati hasil taksasi produksi entres sebagai berikut:

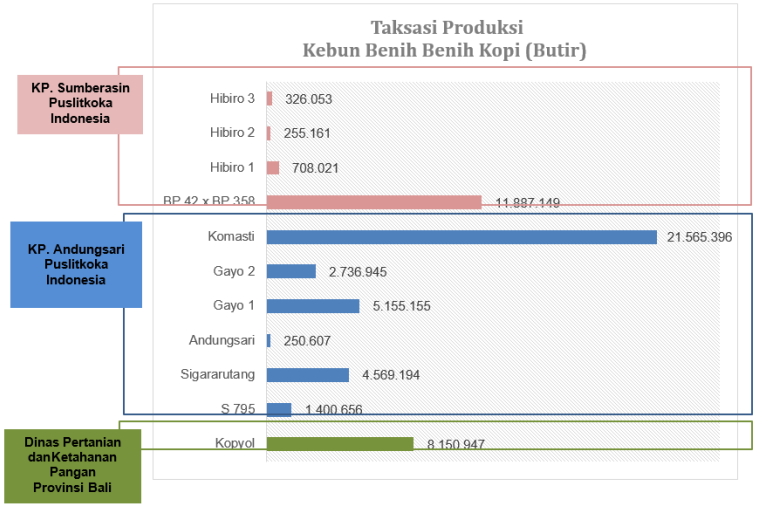

Gambar 3. Hasil Taksasi Produksi Entres

1. Kebun benih induk kopi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali varietas S 795 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dihentikan sebagai kebun sumber benih dan dapat diahlikan sebagai kebun produksi (biji konsumsi);
2. Jika akan dibangun kembali sebagai kebun sumber benih, sebaiknya dibongkar dan ditanam dengan menggunakan bahan tanam dari benih penjenis (breeder seed) sesuai dengan Kempentan No. 27/Kpts/KB.020/KB.020/05/2021
3. Kebun Benih Sumber Kopi di Kebun KP. Sumber Asin milik Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia memenuhi syarat sebagai kebun sumber benih Kopi Robusta Propelegitim
4. Untuk menghasilkan benih propeligitim BP 42 x BP 358 dan resiproknya (BP 358 x BP 42) maka benih harus dipanen dan diprosessing secara terpisah;

5. Perlu dilakukan pemurnian ulang terkait populasi-populasi tanaman sulaman yang akan memasuki fase tanaman produktif di Kebun Sumber benih Hibiro milik KP. Sumber Asin Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
6. Proses panen hingga prosessing benih agar dipisahkan antara BP 936 dan BP 534 (resiproknya), BP 534 x BP 936 (resiproknya);
7. Benih Hibiro 3 hanya dipanen dari pohon tetua betina (BP 939), sedangkan biji yang dipanen dari pohon tetua jantan (BP 936) dipanen sebagai biji kopi produksi (bukan sebagai sumber benih).

(d) Pengawasan Kebun Sumber Benih Kakao

Berdasarkan pengamatan kebun sumber benih Kakao di lapangan, didapati hasil taksasi produksi entres sebagai berikut:

Grafik 4. Taksasi Produksi Kebun Sumber Benih Kakao (Butir)

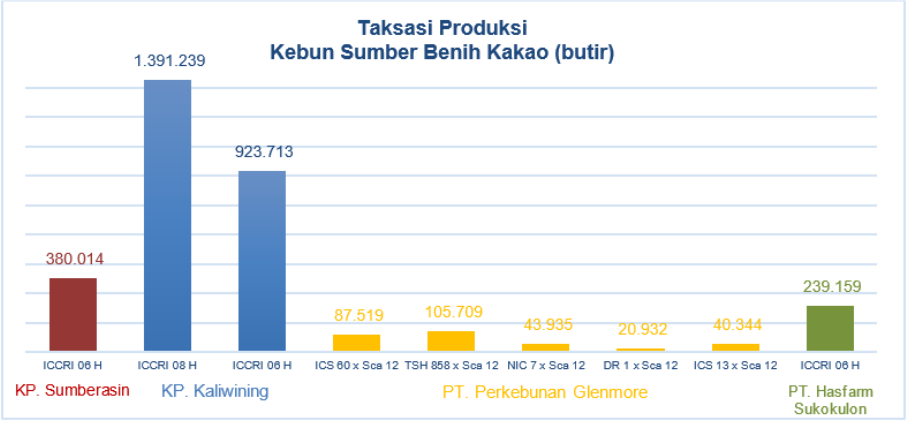

(e) Penetapan Kebun Sumber Benih

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelayakan kebun sumber benih kakao milik PT. Hasfarm Niaga

Nusantara seperti yang terdapat pada Gambar 4 dan Gambar 5 dinyatakan tidak layak sebagai kebun sumber benih dikarenakan banyak tanaman yang mati dan tumbuhnya *off type* berupa tanaman asal biji (seedling) yang tumbuh dari batang bawah (data populasi terlampir). Kondisi tanaman sudah tua, mengeras dan tingkat serangan VSD cukup tinggi.

Calon Kebun Entres Kakao PT. Hasfarm Sukokulon

Klon	Blok	Luas (Ha)	Potensi Produksi
ICCRI 06 H	1	1,500	811.447
Jumlah		***1,500***	***811.447***

Calon Kebun Entres Kakao Puslitkoka Indonesia

Klon	Potensi Produksi Entres /Tahun
Sulawesi 1	490,534
Sulawesi 2	183,236
MCC 02	853,487
ICCRI 03	251,194
ICCRI 09	397,448

Gambar 4. Calon Kebun Benih Kakao

Calon Kebun Induk Kopi Robusta Puslitkoka Indonesia KP. Sumberasin

Klon	Blok	Luas (Ha)	Potensi Produksi
Hibiro 1 + Hibiro 2	F4	0,460	730.823
Hibiro 1 + Hibiro 2	E16	0,640	1.116.521
Hibiro 3	E17	0,620	1.496.705
Hibiro 4	I4	0,570	1.414.145
Hibiro 5	H11	0,570	1.289.434
Jumlah		***2,860***	***6.047.628***

Gambar 5. Calon Kebun Benih kopi

d) Pelaksana uji profisiensi

Tujuan uji profisiensi adalah untuk menentukan dan memonitor kesinambungan unjuk kerja laboratorium pengujian mutu benih tanaman perkebunan. Pelaksanaan uji profisiensi dengan ruang lingkup tanaman perkebunan hanya dilaksanakan oleh Laboratorium Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman

Perkebunan Surabaya yang telah dapat menerapkan metode statistik berdasarkan Prosedure *ISTA Proficiency Test Programme.*

Bahan uji yang disiapkan dalam pelaksanaan uji profisiensi tahun 2022 ini adalah dua komoditi yaitu Benih Kopi *(Coffea sp.)* dan benih Rosella (*Hibiscus sabdariffa).* Bahan uji yang dikirim dan diterima oleh peserta uji profisiensi adalah bahan uji yang homogen dan stabil sehingga data peserta dapat dievaluasi dan dianalisis sesuai dengan yang diatur dalam SNI ISO/IEC 17043 : 2010. Peserta uji profisiensi adalah laboratorium UPTD wilayah kerja BBPPTP Surabaya serta laboratorium BBPPTP Medan, BBPPTP Ambon, Ballitas Malang dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan, Bekasi. Parameter Pengujian:

(1) Parameter yang diuji untuk benih Kopi meliputi: analisis Kemurnian Fisik (KF), penetapan kadar air (KA) dan pengujian berkecambah (DB); dan
(2) Parameter yang diuji untuk benih Rosella meliputi: analisis Kemurnian Fisik (KF), penetapan kadar air (KA) dan pengujian daya berkecambah (DB).

Pelaksanaan uji profisiensi meliputi: perencanaan, penyiapan bahan uji, pelaksanaan pengujian, pengolahan data dan evaluasi hasil.

Evaluasi hasil uji yang disampaikan oleh laboratorium peserta dilakukan dengan melihat kesesuaian cara perhitungan dan pelaporan hasil sesuai dengan ISTA *Rules*. Evaluasi unjuk kerja laboratorium pada uji profisiensi tahun 2021 menggunakan dua

kategori yaitu memuaskan dan tidak memuaskan, yang sebelumnya dilakukan seleksi awal. Apabila hasil peserta tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka hasil pengujian tersebut tidak diikutkan untuk evaluasi lebih lanjut dan dinyatakan kurang memuaskan. Peserta dengan kriteria tidak memuaskan perlu melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan melalui investigasi untuk menemukan akar permasalahan pada pengujian mutu benih laboratorium. Secara umum terjadi peningkatan unjuk kerja laboratorium peserta, khususnya pada parameter kemurnian fisik dan penetapan kadar air.

Terkait administrasi ISO 17043 yang dicabut status akreditasinya, pada saat ini tim manajemen sedang mempersiapkan dokumen mulai dari SK, Panduan Mutu, Dokumen Prosedur, Instruksi Pengujian dan dokumen lain yang mendukung untuk pengajuan ulang akreditasi ISO 17043:2010. Dijadwalkan pada awal tahun 2023 akan dilakukan asesmen awal oleh pihak Komite Akreditasi Nasional.

e) Pengawasan peredaran benih

1) Pelaksanaan Pengawasan peredaran benih secara berkala

Kegiatan pengawasan peredaran benih secara berkala akan dilaksanakan dengan mengirimkan surat kepada produsen benih untuk meminta data benih yang dilakukan tiap semester. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pemantauan benih yang beredar di lintas provinsi.

Data dari produsen benih terkait benih yang diedarkan:

1. Puslitbangbun, Bogor = Nilam, Lada, Vanili, Serai wangi ke wilayah Jawa Barat, Jatim, Jateng, DIY Bali
2. CV Lang Buana = Tebu ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah

3. CV SUkses Tani Kelapa Genjah ke wilayah Jawa Tengah
4. CV Budi Jaya Sejati Kelapa Genjah Bali ke BBPPTP Medan
5. CV Indonesia Hijau Kelapa Genjah ke wilayah Jawa Tengah

Data Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih di Wilayah Kerja disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18. Data Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih di Wilayah Kerja

No	Jawa Barat		Jawa Tengah		Jawa Timur	
	Komoditas	Wilayah Salur	Komoditas	Wilayah Salur	Komoditas	Wilayah Salur
1	Vanili	Jateng, DIY, Bengkulu, Lampung, Sumsel	Kopi Robusta	Grobogan	Kakao	Kaltim, Sulteng, Sultra, Sulsel, Jatim, Papua, Jabar, Kalbar, Kaltara
2	Nilam	Jawa Tengah.	Kelapa dalam	Batang	Cengkeh	Jatim
3	Kopi Robusta	Kalsel,	Kelapa Genjah	Batang	Tembakau	Jatim
4	Kopi Arabika	NTT	Genjah Kopyor	NTB, DIY	Kopi	Jatim
5	Serai Wangi	Jawa Timur, Bali			Kelapa	Jatim
6	Kelapa Dalam	Aceh				

Data tersebut dapat digunakan untuk melakukan cross cek data apakah benih yang beredar tersebut adalah benih legal atau illegal. Pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran benih yang dilaksanakan secara berkala pada produsen benih belum maksimal karena tidak semua produsen mau merespon permintaan data dari BBPPTP Surabaya

2) Pelaksanaan pengawasan peredaran benih sewaktu-waktu

(a) Pengawasan Peredaran Benih di Provinsi Bali

Kegiatan pengawasan peredaran kelapa genjah kuning dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 Maret 2022. Sebanyak 110 batang akan Kelapa genjah kuning berasal dari kota Denpasar, Bali akan dikirim ke Kabupaten Belu Provinsi NTT untuk mendukung kegiatan perluasan tanaman kelapa dalam seluas 100 Ha, sebagai bentuk dukungan pengembangan *food estate* Belu dari Direktorat Jenderal perkebunan.

(b) Pengawasan Peredaran Benih di Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan pengawasan peredaran benih ke CV. Joyo Rosan Kabupaten Kediri dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Maret 2022. Kegiatan ini melaksanakan pemeriksaan legalitas produsen/sumber benih yang berupa tanda daftar/trup/surat rekomedasi. Dari hasil pengawasan diketahui bahwa CV Joyo Rosan mengedarkan benih sesuai dengan produksi yang dilakukan oleh Produsen tersebut.

(c) Pengawasan Peredaran Benih di Provinsi Sulawesi Barat

Pelaksanaan pengawasan peredaran benih ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 April 2022. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti informasi berdasarkan surat dari BPSMBP Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3802.02.01/04/2022 tanggal 22 Maret 2022 bahwa terdapat permohonan sertifikasi benih kopi dari CV. Sari Bumi Surya dan CV. Wahyuni Mandiri dengan dokumen asal usul benih kopi yang dibeli dari Puslitkoka dalam bentuk biji (Sertifikat Pengujian Mutu Laboratorium) tetapi dikirim ke lokasi dalam bentuk kepelan karena biji tersebut disemaikn di kebun persemaian Puslitkoka.

Mengingat pada Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 27/Kpts/KB.020.05/2021 tentang Pedoman Produksi Sertifikasi Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi pada Bab III. Sertifikasi dan pelabelan kopi dapat dibagi menjadi:

(1) dalam bentuk biji (pengujian laboratorium);
(2) benih kopi di persemaian;
(3) benih kopi siap tanam dalam polybag;
(4) benih kopi dalam bentuk entres; dan

(5) dalam bentuk kopi somatic embryogenesis (SE).

Didalam keputusan Menteri Pertanian RI tersebut belum teradapat mekanisme pengiriman benih kopi dalam bentuk kepelan.

Dari hasil Koordinasi dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia diperoleh hasil bahwa pengiriman benih dalam bentuk kepelan benar adanya dikarenakan ada beberapa hal:

(1) Terdapat komplain konsumen terkait dengan daya kecambah benih kopi pada tahun 2020 – 2021 yang menyebabkan kerugian Puslitkoka yang cukup besar, maka mulai akhir tahun 2021 Puslitkoka memiliki kebijakan untuk melakukan pengiriman benih kopi dalam bentuk kepelan (biji yang telah disemai di Puslitkoka)

(2) Menurut Pemulia dari Pusat Penelitian Kopi probabilitas daya benih tumbuh dari kepelan dibanding dengan biji, hasilnya lebih tinggi daya tumbuhnya yang dari kepelan.

Solusi tentang permasalahan ini adalah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia harus mengirimkan surat Kepada Direktorat Jenderal Perkebunan terkait inovasi pengiriman benih kopi dalam bentuk kepelan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao.

Pelaksanaan sertifikasi benih kopi robusta di Provinsi Sulawesi Barat (CV. Sari Bumi Surya dan CV. Wahyuni Mandiri) hanya akan dilakukan setelah mendapat arahan dari Direktorat Jenderal Perkebunan.

3) Kendala

(a) Kurangnya SDM yang dimiliki oleh UPTD mengingat luasan di tiap-tiap Provinsi memiliki cakupan wilayah yang cukup luas

(b) Benih dibeli melalui dana APBD Kab/Kota sehingga langsung dikirim ke lokasi tanpa sepengetahuan dari UPTD/Dinas Provinsi.

(c) Penyaluran benih lintas provinsi dapat terjadi antara produsen dengan konsumen secara langsung tanpa keterlibatan pemerintah, karena untuk keperluan penelitian atau konsumsi perseorangan.

(d) Belum adanya kesadaran para produsen benih untuk melaporkan benih yang masuk.

f) **Produksi benih**

Produksi benih pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19. Produksi Benih Tanaman Perkebunan

No	Lokasi	Komoditas	Target	Produksi Benih	Penyaluran
1	Nursery Bombana	Jambu Mete	100.000 Batang	81.440 Batang (81.240 Seedling) (200 Grating)	Grafting telah disertifikasi Penyaluran benih ke kabupaten Bombana, Buton Selatan, Sumba timur, Belu dan Malaka.
2	Nusery Bima	Kelapa	2.000 Batang	2.840 Batang	di distribusikan di wilayah kerja Dinas Pertanian Kota Bima
3	Nusery Lumajang	Kakao	45.000 Batang	17.449 Batang (grafting)	Rencana penyaluran pada Januari 2023 dan Maret 2023
4	Nusery Probolinggo	Kopi	40.000 batang	54.062 batang (seedling)	Rencana penyaluran pada Maret 2023
5	Nusery Polbangtan	Tebu	2.337.000 mata	2.148.500 mata 19.499 batang SBP	Saat ini Proses sertifikasi oleh BPSB Jatim dan penyaluran akhir Desember 2022 dan Januari 2023
6	Nusery Tuban	Tebu		Ouput Produksi Laboratorium Kuljar 6.914 planlet.	Masih proses aklimatisasi 1.868 cup varietas Bululawang dan 2.672 cup varietas PS 862 di lahan pembesaran Malang; masih proses aklimatisasi 2 sebanyak 2.979 polibag varietas Bululawang dan 740 polibag

No	Lokasi	Komoditas	Target	Produksi Benih	Penyaluran
					varietas PS 862 di lahan pembesaran Malang; terdapat 1.950 rumpun msh di lahan pembesaran Tuban
7	Nusery Batang	Kelapa	120.000 Batang	114.000 Batang	Kelapa dalam siap salur 5.000 btang di bln Desember, Genjah Siap salur 2.000 di bulan Januari Penyaluran bertahap hinggan Mei 2023
8	Nusery Cianjur	Kopi	40.000 Batang (seedling)	43.751 Batang (seedling)	Disalurkan ke 5 kelompok tani di wilayah Kec. Campaka dan Kec. Sukanegara Kab. Cianjur
9	BPTP Gorontalo	Kelapa	10.000 batang kelapa dalam	12.000 batang kelapa dalam	Selesai Penyaluran April-Mei 2022
10	BPTP NTB	Kelapa	10.000 Batang	12.536 Batang	Kelapa dalam siap salur 2.000 batang di bulan Desember 2022, selanjutnya bertahap hingga bulan Mei 2023
11	Nursery UGM-Jogjakarta	Kelapa		Tidak ada Kegiatan Produksi pada tahun 2022	-
12	Nusery Unhas-Makasar	Kakao		Tidak ada Kegiatan Produksi pada tahun 2022	-
13	Balai Produksi - Jabar (lokasi Kab. Cianjur dan Kab.Garut)	Kopi	400.000 Batang	400.000 Batang	CPCL di wilayah Kabupaten Clanjur dan Kabupaten Garut pada April 2023
14	Nursery Bali-Bali	kelapa		Progres Pembangunan Infrastruktur	-
15	Nursery Pangandaran-Jabar	Kelapa		Progres Pembangunan Infrastruktur	-

3. **Sasaran kegiatan terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien** dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya tercapai pada 3 Skala Likert (1-4) dengan nilai IKM **89,01**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mutu Pelayanan Publik pada BBPPTP Surabaya dalam kategori **A.** Nilai tersebut Kinerja Unit Pelaksana Pelayanan Publik (UKPP) yaitu BBPPTP Surabaya adalah "**Sangat Baik"**.

B. Nilai Kinerja BBPPTP Surabaya

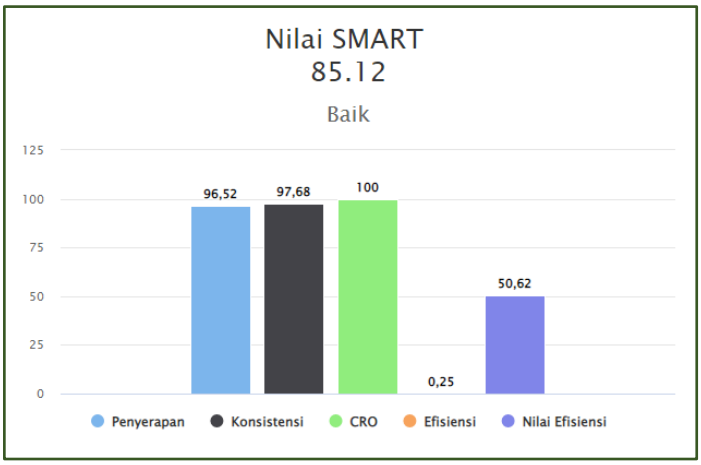

Gambar 6. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART 2022

Nilai kinerja (NK) BBPPTP Surabaya Tahun 2022 sebesar **85,12** dan masuk dalam kategori BAIK. Nilai Kinerja BBPPTP Surabaya mengalami peningkatan 2,3 dan capaian NK meningkat 0,023%.

C. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sesuai yang diamanahkan dalam Permen PAN&RB Tahun 2014, Laporan Kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Instansi Pemerintah diwajibkan mengevaluasi dan menganalisis kinerja berdasarkan aspek sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK);
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran);
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Untuk mengukur setiap indikator kinerja sasaran program (IKSP) dalam perjanjian kinerja (PK) berpedoman pada manual IKU yang ditetapkan pada saat penyusunan IKSP lingkup Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk mengukur efisiensi (E) pada satuan kerja digunakan formula berdasarkan PMK 22 Tahun 2022, sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((\mathrm{AAROi} \times \mathrm{CROi}) - \mathrm{RAROi}\right)}{\sum_{i=1}^{n}(\mathrm{AARO_i})} \times 100\%$$

Keterangan:
ERO : efisiensi RO tingkat satuan kerja
AAROi : alokasi anggaran RO i
RAROi : realiasi anggaran RO i
CROi : capaian RO i

Sedangkan untuk mengukur Nilai Efisiensi (NE) digunakan formula sebagai berikut:

$$\mathrm{NE} = 50\% + (\frac{\mathrm{E}}{20} \times 50)$$

Keterangan:
NE : Nilai efisiensi
E : Efisiensi

Dari formula tersebut berarti suatu kegiatan dikatakan efisien jika memiliki nilai efisiensi lebih besar sama dengan 50% dan jika lebih besar dari 100% dikatakan efisien tetapi perlu penjelasan lebih lanjut karena dianggap anomali.

1. Sasaran terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yaitu jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan.

Target dan realisasi indikator jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan tahun 2022 beserta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Target dan Capaian Sasaran Terkendalinya OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan

Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Keberhasilan
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	1-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan	Layanan	6	6	100%	Berhasil

Capaian kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi proteksi tanaman perkebunan dilihat berdasarkan jumlah layanan target indikator kinerja, yaitu:

a) Pengujian Mutu Agens Pengendali Hayati (APH)
b) Pengujian Mutu Formulasi Pestisida, Residu Pestisida dan Logam Berat
c) Layanan Penyediaan Isolat Agens Pengendali Hayati (APH)
d) Layanan Penyediaan Formulasi APH dan Pupuk Hayati
e) Layanan Identifikasi OPT dan Rekomendasi Pengelolaan OPT
f) Layanan Penyediaan Data dan Informasi OPT.

Berdasarkan Tabel 20 dapat dijelaskan bahwa realisasi jumlah layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi proteksi tanaman perkebunan sebesar 100% dari target yang ditetapkan atau masuk kategori Berhasil.

Dengan capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan bahwa layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi proteksi tanaman perkebunan yang diberikan kepada pengguna jasa bisa termanfaatkan dengan baik. Diharapkan dengan bantuan sarana yang diberikan bisa meningkatkan pengendalian penyebaran OPT khususnya pada tanaman perkebunan.

a) Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun sebelumnya

Realisasi capaian kinerja Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan tahun 2022 terhadap tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Rekomendasi Data dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan

IKSK	Target	Satuan	Realisasi			2022 dibanding tahun sebelumnya	
			2020	2021	2022	2020	2021
Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan	6	Layanan	-	6	6	-	6

Berdasarkan Tabel 21 di atas, realisasi jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan tahun 2022 adalah 6 layanan dengan persentase capaian 100%. Jumlah dan persentase capaian kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 adalah sama atau tidak melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa BBPPTP Surabaya dapat mempertahankan kinerjanya dengan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat terutama pengguna jasa sesuai dengan jumlah target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 belum dapat diukur karena belum ada indikator kinerja sasaran kegiatan jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan.

b) Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi kinerja pada tahun 2022 IKSK jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan dibandingkan dengan target jangka menengah perencanaan strategis jangka menengah organisasi telah memenuhi target yang

ditetapkan, yaitu 6 (enam) layanan dengan persentase sebesar 100%. Realisasi tersebut sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 60% dari target jangka menengah 2020-2024.

c) Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa jumlah layanan rekomendasi data dan informasi dan proteksi tanaman perkebunan tahun 2022 masuk dalam kategori berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sarana perkebunan yang diberikan kepada kelompok sasaran dimanfaatkan secara optimal dan tetap. Keberhasilan kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1) Perencanaan kegiatan dilakukan secara baik dan terukur
2) Cepat tanggap dengan segera menelaah POK dan revisi kegiatan apabila terjadi ketidaksesuaian baik yang terkait dengan unit cost, ketersediaan SDM dll.
3) Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan (ROPAK) yang telah dibuat.
4) Pembinaan yang terus dilakukan ke ULPPTP di wilayah kerja BBPPTP Surabaya baik melalui kunjungan ataupun melalui media elektronik seperti telpon, email, atau melalui aplikasi meeting online.
5) SDM yang melaksanakan kegiatan bertumpu pada petugas yang memiliki kapabilitas teknis yang memadai.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan antara lain:

1) Terdapat kerusakan alat dan bahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan uji Laboratorium.
2) Pengaruh kondisi cuaca yang mempengaruhi keberadaan OPT, sehingga dapat merubah ROPAK.
3) Tidak semua stakeholder memberikan respon yang baik

terhadap output kegiatan.

4) Data serangan OPT dari UPTD sering terlambat masuk yang disebabkan keterbatasan SDM Pengumpul Data di ULPPTP, sehingga hal ini menghambat proses rekapitulasi data OPT.

Solusi/upaya tindak lanjut terhadap permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan adalah sebagai berikut:

1) Menambah anggaran perawatan terhadap alat-alat dan bahan Laboratorium.
2) Melaksanakan sosialisasi secara rutin terhadap stakeholder agar dapat mengetahui manfaat output kegiatan dari BBPPTP Surabaya.
3) Memaksimalkan SDM yang telah ada dan membuat inovasi untuk mempercepat proses bisnis rekapitulasi data OPT dari UPTD melalui pengumpul data di ULPPTP.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian ataupun kegagalan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan

No.	Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E	Keterangan
		Keuangan	Fisik		Keuangan	%	Fisik					
			Vol	Sat			Vol	Sat	%			
1	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	160,349,000	4	Rekomendasi	159,047,672	99.19	3,91	Rekomendasi	97.64	52.029	0.812	efisien
2	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan	49,700,000	1	Unit	49,630,000	99.86	1,00	Unit	100.00	50.352	0.141	efisien
3	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	348,550,000	2	paket	347,011,636	99.56	2,00	paket	100.00	51.103	0.441	efisien
4	Sertifikasi Produk	1,629,209,000	13	produk	1,628,890,624	99.98	12,77	produk	98.27	51.811	0.725	efisien
5	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	358,325,000	20	Ha	358,206,300	99.97	19,87	Ha	99.34	50.083	0.033	efisien
6	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	235,850,000	100	Ha	235,190,000	99.72	99,06	Ha	99.06	51.224	0.490	efisien
Total/Rata-rata		2,781,983,000			2,777,976,232	99.71				50.01	0.440	

Kegiatan dikatakan efisien apabila memiliki Nilai Efisiensi (NE) > 50 sd 100, dimana nilai paling efisien di angka NE=50. Kegiatan juga dikatakan efisien bila memiliki Efisiensi (E) antara -20 sd 20 dimana paling efisien di angka E= 0.

Dari Tabel 22 di atas diketahui nilai efisiensi sasaran kegiatan Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan rata-rata sebesar 50,01% dan efisiensi 0,440 (efisien), dengan rincian pencapaian sebagai berikut:

1) Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan dari pagu anggaran RP 160.349.000,- terealisasi Rp 159.047.672,- atau 99,19% dengan capaian fisik 3,91 rekomendasi (97,64%), dengan nilai efisiensi 52,029% (efisien).
2) Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan dari

pagu anggaran Rp 49.700.000,- terealisasi Rp 49.630.000,- atau 99,86% dengan capaian fisik 1 (satu) unit (100%), dengan nilai efisiensi 50,352 (efisien).

3) Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan dari pagu anggaran Rp 348,550,000,- atau 99,56% dengan capaian fisik 2 (dua) paket (100%), dengan nilai efisiensi 51,103% (efisien).
4) Sertifikasi Produk dari pagu anggaran Rp 1.629.209.000,- terealisasai Rp 1.628.890.624,- atau 99,98% dengan capaian fisik 12,77 produk (98,27%), dengan realisasi nilai efisiensi 51,811% (efisien).
5) Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun dari pagu anggaran Rp 358.325.000,- terealisasi Rp 358,206,300,- atau 99,97% dengan capaian fisik 19,87 ha (99,34%), dengan nilai efiensi 50,083% (efisiensi).
6) Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dari pagu anggaran Rp 235.850.000,- terealisasai Rp 235,190,000- atau 99,72% dengan capaian fisik 99,06 ha (99,06%), dengan realisasi nilai efisiensi 51,244% (efisien).

2. Sasaran tersedianya benih tanaman perkebunan

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yaitu jumlah layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi perbenihan tanaman perkebunan. Target dan realisasi indikator jumlah layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi perbenihan tanaman perkebunan tahun 2022 beserta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Target Dan Capaian Sasaran Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan

Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Keberhasilan
Tersedianya benih tanaman perkebunan	2-1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi perbenihan tanaman perkebunan	Layanan	6	6	100%	Berhasil

Capaian kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi proteksi tanaman perkebunan dilihat berdasarkan target indikator kinerja, yaitu

a) sertifikasi benih tanaman perkebunan di wilayah kerja
b) pengujian mutu benih laboratorium
c) pengawasan sumber benih
d) pelaksana uji profisiensi
e) pengawasan peredaran benih
f) produksi benih

Berdasarkan Tabel 23 dapat dijelaskan bahwa realisasi jumlah layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi perbenihan tanaman perkebunan sebesar 100% dari target yang ditetapkan atau masuk kategori Berhasil.

Dengan capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan bahwa layanan rekomendasi data dan informasi dan informasi perbenihan tanaman perkebunan yang diberikan kepada pengguna jasa bisa termanfaatkan dengan baik. Diharapkan dengan bantuan sarana yang diberikan bisa meningkatkan mutu benih tanaman perkebunan.

a) Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun sebelumnya

Berdasarkan Tabel 23 di atas, realisasi jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan tanaman

perkebunan tahun 2022 adalah 6 layanan dengan persentase capaian 100%. Jumlah dan persentase capaian kinerja jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan tanaman perkebunan pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 adalah sama atau tidak melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa BBPPTP Surabaya dapat mempertahankan kinerjanya dengan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat terutama pengguna jasa sesuai dengan jumlah target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 belum dapat diukur karena belum ada indikator kinerja sasaran kegiatan jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan.

Tabel 24. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Jumlah Layanan Rekomendasi Data dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan

IKSK	Target	Satuan	Realisasi			2022 dibanding tahun sebelumnya	
			2020	2021	2022	2020	2021
Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan tanaman perkebunan	6	Layanan	-	6	6	-	6

b) Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi kinerja pada tahun 2022 IKSK jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan tanaman perkebunan dibandingkan dengan target jangka menengah perencanaan strategis jangka menengah organisasi telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 6 (enam) layanan dengan persentase sebesar 100%. Realisasi tersebut sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 60% dari target jangka menengah 2020-2024.

c) Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya tahun 2022 masuk dalam kategori berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sarana perkebunan yang diberikan kepada kelompok sasaran dimanfaatkan secara optimal dan tetap. Keberhasilan kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1) Perencanaan kegiatan dilakukan secara baik dan terukur
2) Cepat tanggap dengan segera menelaah POK dan revisi kegiatan apabila terjadi ketidaksesuaian baik yang terkait dengan unit cost, ketersediaan SDM dll.
3) Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan (ROPAK) yang telah dibuat.
4) SDM yang melaksanakan kegiatan bertumpu pada petugas yang memiliki kapabilitas teknis yang memadai.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan antara lain:

1) Kegiatan diluar tugas dan fungsi fungsional maupun organisasi terlalu banyak (kegiatan kawasan tanaman tahunan dan penyegar).
2) Refocusing DIPA di beberapa kegiatan rutin menyebabkan kegiatan tidak dapat terlaksana.
3) Pelaksanaan penyiapan bahan produksi benih tidak sesuai dengan jadwal sehingga menghambat proses kegiatan, misalnya penyerapan HOK yang mengakibatkan kegiatan harus lompat ke tahun berikutnya. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa hal yang antara lain revisi DIPA yang terjadi pada semester II di beberapa kegiatan sehingga berakibat pada terlambatnya proses pengadaan barang dan proses

produksi benih serta salur benih.

Solusi/upaya tindak lanjut terhadap permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan adalah sebagai berikut:

1) Menyesuaikan jumlah penugasan dengan tugas dan fungsi pegawai dan organisasi.
2) Penambahan DIPA untuk kegiatan rutin yang menjadi tugas pokok dari BBPPTP Surabaya, sehingga bisa menjadi lebih maksimal.
3) Monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan proses produksi benih terutama dalam tahap penyiapan bahan produksi benih.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian ataupun kegagalan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Kegiatan Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan

No.	Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E	Ket.
		Keuangan	Fisik		Keuangan	%	Fisik					
			Vol	Sat			Vol	Sat	%			
1	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	729,668,000	111,596,000	Batang	693,422,420	95.03	95,202,174.15	Batang	85.31	25.69	-9.723	efisien
2	Pengujian Mutu Benih	340,000,000	7,439,740	Batang	336,999,480	99.12	6,735,629.44	Batang	90.54	30.36	-7.856	efisien
3	Nursery	19,132,510,000	7	Unit	17,966,930,646	93.91	5.81	Unit	83.04	63.08	5.235	efisien
Total/Rata-rata		20,202,178,000			18,997,352,546	48.01				39.71	-4.11	

Dari tabel di atas diketahui nilai efisiensi sasaran kegiatan Sasaran Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan rata-rata

sebesar 39,9% dan efisiensi -4,11 (efisien), dengan rincian pencapaian sebagai berikut:

1) Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan dari pagu anggaran RP 729.668.000,- terealisasi Rp 693.422.420,- atau 95,03% dengan capaian fisik 95.202.174,15 batang (85,31%), dengan efisiensi -9,723 (efisien).
2) Pengujian Mutu Benih dari pagu anggaran RP 340.000.000,- terealisasi Rp 336.999.480,- atau 99,12% dengan capaian fisik 6.735.629,44 batang (90,54%), dengan efisiensi -7,856 (efisien).
3) Nursery dari pagu anggaran RP 19.132.510.000,- terealisasi Rp 17.966.930.646- atau 93,91% dengan capaian fisik 5,81 unit (83,04%), dengan efisiensi 5,235 (efisien).

3. Sasaran terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Target dan realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya tahun 2022 beserta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan Yang Efektif Dan Efisien

Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Keberhasilan
Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien	3-1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	Skala Likert (1-4)	3	3	100%	Berhasil

Sumber: BBPPTP Surabaya, 2022

Capaian kinerja Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien dilihat berdasarkan target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya yaitu 3 Skala Likert (1-4) tercapai. Indeks Kepuasan Masyarakat BBPPTP Surabaya Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini.

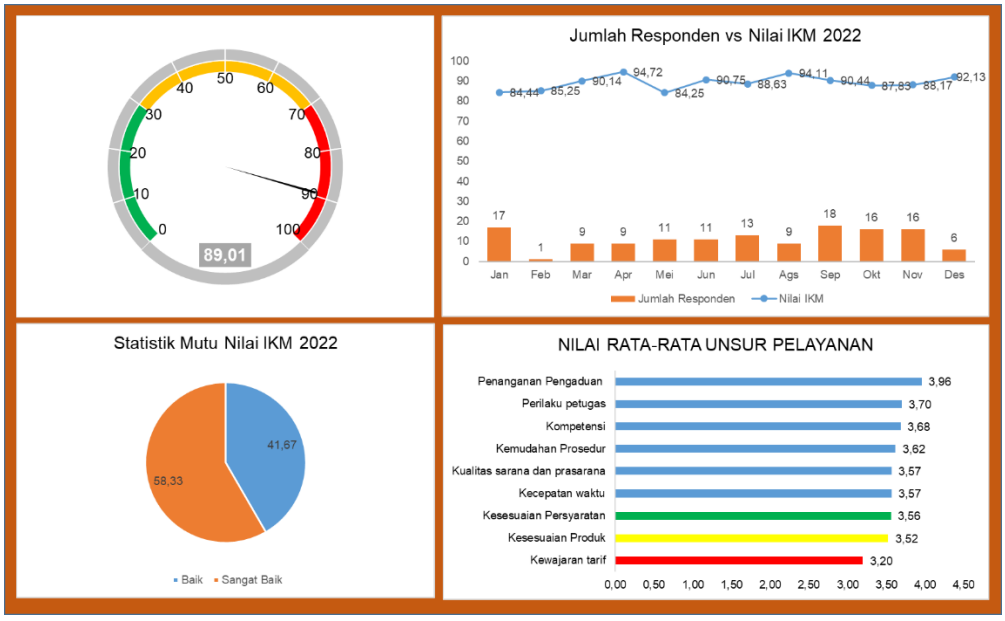

Gambar 7. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat BBPPTP Surabaya Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 7 di atas dapat dijelaskan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 yang dilakukan di BBPPTP Surabaya diikuti oleh 136 Orang dengan responden dari berbagai latar belakang pendidikan. Pertanyaan yang diajukan bersifat umum karena digunakan kepada seluruh instansi pelayanan yang ada di Kementerian Pertanian. Kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat diajukan dengan 9 (sembilan) pertanyaan terkait unsur pelayanan yang ada di BBPPTP Surabaya antara lain:

a) Kesesuaian Persyaratan Pelayanan (U1) dengan nilai 3,56
b) Kemudahan Prosedur Pelayanan (U2) dengan nilai 3,36
c) Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan (U3) dengan nilai 3,57

d) Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan (U5) dengan nilai 3,20
e) Kesesuain Produk Pelayanan antara yang tercantum dengan hasil yang diberikan (U6) dengan nilai 3,52
f) Kompetensi pelaksana/kemampuan petugas dalam pelayanan (U7) dengan nilai 3,68
g) Perilaku Petugas dalam pelayanan (U8) dengan nilai 3,70
h) Kualitas sarana dan prasarana (U8) dengan nilai 3,57 dan
i) Penanganan Pengaduan pengguna layanan (U9) 3,96.

Berdasarkan penilaian dari responden tersebut terhadap unsur-unsur pelayanan diperoleh nilai IKM yang telah dikonversikan menjadai antara 100 menghasilkan nilai IKM sebesar **89,01**, sehingga dapat disimpulkan bahwa Mutu Pelayanan Publik pada BBPPTP Surabaya dalam kategori **A.** Nilai tersebut Kinerja Unit Pelaksana Pelayanan Publik (UKPP) yaitu BBPPTP Surabaya adalah "**Sangat Baik"**.

Pada Gambar 7 terdapat 3 (tiga) nilai rata-rata pelayanan rendah yaitu:

1) Kewajaran Tarif dengan nilai 3,20. Rendahnya nilai tersebut tidak berarti pengguna jasa dikenakan tarif diluar kewajaran. Setiap layanan yang diberikan kepada pengguna jasa dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. Rencana tindaklanjut terhadap nilai Kewajaran Tarif adalah dengan memberikan penjelasan kepada pengguna jasa terkait dengan tarif PNBP yang sudah ditetapkan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media (website dan media sosial). Tindaklanjut perlu dilakukan agar pelanggan/pegguna jasa dapat memahami rincian biaya dikeluarkan.
2) Unsur kesesuaian produk dengan nilai 3,52. Produk layanan yang diberikan oleh BBPPTP Surabaya telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nilai tersebut dapat ditingkatkan dengan cara menyampaikan kepada responden bahwasanya produk layanan

BBPPTP Surabaya telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Unsur kesesuaian persyaratan dengan nilai 3,56. Persyaratan yang ditetapkan untuk memperoleh pelayanan BBPPTP Surabaya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai tersebut dapat ditingkatkan dengan cara menyampaikan kepada responden bahwasanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh responden telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Standar kinerja ini merepresentasikan capaian kinerja dan merupakan indikator keberhasilan kinerja BBPPTP Surabaya sebagai upaya mewujudkan target kinerja yang direncanakan sesuai pada perjanjian Kinerja dan untuk mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

a) Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun sebelumnya

Berdasarkan Tabel 27, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya pada tahun 2022 tercapai. Jumlah dan persentase capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 adalah sama atau tidak melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa BBPPTP Surabaya dapat mempertahankan kinerjanya dengan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat terutama pengguna jasa sesuai dengan jumlah target yang ditetapkan.

Tabel 27. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya

IKSK	Target	Satuan	Realisasi			2022 dibanding tahun sebelumnya	
			2020	2021	2022	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	3	Skala Likert (1-4)	3	3	3	-	-
Nilai IKM			85,30 Kategori B (Baik)	88,33 Kategori A (Sangat Baik)	89,01 Kategori A (Sangat Baik)	3,71%	0,68%

Realisasi kinerja pada tahun 2022 IKSK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya dibandingkan dengan IKM pada tahun 2020 meningkat 3,71% sedangkan jika dibandingkan dengan IKM pada tahun 2021 meningkat 0,68%. Secara umum mutu Pelayanan Publik pada BBPPTP Surabaya selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa BBPPTP Surabaya memiliki komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama pengguna jasa.

b) Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi kinerja pada tahun 2022 IKSK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya dibandingkan dengan target jangka menengah perencanaan strategis jangka menengah organisasi telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 3 Skala Likert (1-4) dengan persentase sebesar 100%. Realisasi tersebut sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 60% dari target jangka menengah 2020-2024.

c) Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya tahun 2022 masuk dalam kategori berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sarana perkebunan yang diberikan kepada kelompok sasaran dimanfaatkan secara optimal dan tetap. Keberhasilan kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1) Perencanaan kegiatan dilakukan secara baik dan terukur.
2) Cepat tanggap dengan segera menelaah POK dan revisi kegiatan apabila terjadi ketidaksesuaian baik yang terkait dengan unit cost, ketersediaan SDM dll.
3) Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai ROPAK yang telah dibuat.
4) Pembinaan yang terus dilakukan ke ULPPTP di wilayah kerja BBPPTP Surabaya baik melalui kunjungan ataupun melalui media elektronik seperti telpon, email, atau melalui aplikasi meeting online.
5) SDM yang melaksanakan kegiatan bertumpu pada petugas yang memiliki kapabilitas teknis yang memadai.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan antara lain:

1) Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten.
2) Keterlambatan pembuatan laporan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Kendala ini dapat diselesaikan dengan evaluasi kegiatan setiap bulan oleh masing-masing penanggung jawab kelompok kerja.

3) Keterbatasan SDM yang menangani kegiatan mengakibatkan beberapa pegawai merangkap pekerjaan.

4) Refocusing DIPA di beberapa kegiatan rutin menyebabkan kegiatan tidak dapat terlaksana.

Solusi/upaya tindak lanjut terhadap permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan BBPPTP Surabaya adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan evaluasi rutin setiap bulan terhadap pelaksanaan kegiatan, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana agar ROPAK dapat dilaksanakan secara konsisten.

2) Melaksanakan konseling untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja masing-masing penanggung jawab kegiatan.

3) Menjaga dan meningkatkan kompetensi SDM pada BBPPTP Surabaya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan, *job enrichment*, melakukan rotasi kerja, membangun *teamwork* yang solid, membuat area kerja yang nyaman dan bahagia serta memberikan reward dan punishment secara seimbang.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian ataupun kegagalan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien

No.	Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E	Keterangan
		Keuangan	Fisik		Keuangan	%	Fisik					
			Vol	Sat			Vol	Sat	%			
1	Layanan BMN	273,300,000	1	Layanan	248,998,700	91.11	1	Layanan	100	72.230	8.892	efisien
2	Layanan Umum	1,993,512,000	1	Layanan	1,960,385,242	98.34	1	Layanan	100	54.154	1.662	efisien
3	Layanan Perkantoran	11,799,770,000	1	Layanan	11,454,271,665	97.07	1	Layanan	100	57.320	2.928	efisien
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	522,920,000	1	Unit	522,333,100	99.89	1	Unit	100	50.281	0.112	efisien
5	Layanan Manajemen SDM	408,200,000	149.00	Orang	404,079,468	98.99	147	Orang	98.66	49.982	-0.007	efisien
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	584,140,000	1	Dokumen	583,208,888	99.84	1	Dokumen	100	50.398	0.159	efisien
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	221,400,000	1	Dokumen	219,618,044	99.20	1	Dokumen	100	52.012	0.805	efisien
8	Layanan Manajemen Keuangan	180,000,000	1	Dokumen	179,738,650	99.85	1	Dokumen	100	50.363	0.145	efisien
Total/Rata-rata		985,540,000			13,363,249,815	98.04				50.858	4,385	

Dari tabel di atas diketahui nilai efisiensi sasaran kegiatan Sasaran Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien rata-rata sebesar 50,858% dan efisiensi 4,385 (efisien), dengan rincian pencapaian sebagai berikut:

1) Layanan BMN dari pagu anggaran RP 273.300.000,- terealisasi Rp 248.998.700,- atau 91,11% dengan capaian fisik 100%, dengan nilai efisiensi 72,230 dan efisiensi 8,892 (efisien).

2) Layanan umum dari pagu anggaran RP 1.993.512.000,- terealisasi Rp 1.960.385.242,- atau 98,34% dengan capaian fisik 100%, dengan efisiensi nilai efisiensi 50,154 dan efisiensi 1,662 (efisien).

3) Layanan perkantoran dari pagu anggaran RP 11.799.770.000,- terealisasi Rp 11.454.271.665- atau 97,07% dengan capaian fisik 100%, dengan nilai efisiensi 57,320 dan efisiensi 2,928 (efisien).

4) Layanan Sarana dan Prasarana Internal dari pagu anggaran RP 522.920.000,- terealisasi Rp 522.333.100- atau 99,89% dengan

capaian fisik 100%, dengan nilai efisiensi 50,281 dan efisiensi 0,112 (efisien).

5) Layanan Manajemen SDM dari pagu anggaran RP 408,200,000,- terealisasi Rp 404.079.468- atau 99,99% dengan capaian fisik 100%, dengan nilai efisiensi 49,982 dan efisiensi -0,007 (efisien).

6) Layanan Perencanaan dan Penganggaran dari pagu anggaran RP 584.140.000,- terealisasi Rp 583.208.888- atau 99,84 % dengan capaian fisik 100%, dengan nilai efisiensi 50.398 dan efisiensi 0,159 (efisien).

7) Layanan Perencanaan dan Penganggaran dari pagu anggaran RP 221.400.000,- terealisasi Rp 219.618.044- atau 99,20 % dengan capaian fisik 100%, dengan nilai efisiensi 52,012 dan efisiensi 0,805 (efisien).

8) Layanan Layanan Manajemen Keuangan dari pagu anggaran RP 180.000.000,- terealisasi Rp 179.738.650- atau 99,85 % dengan capaian fisik 100%, dengan nilai efisiensi 50,363 dan efisiensi 0,145 (efisien).

D. Realisasi Anggaran Tahun 2022

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama BBPPTP Surabaya dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan BBPPTP Surabaya Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Kode Kegiatan		Pagu	Realisasi	(%)	% Fisik
1.	1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	32.936.850.000	32.060.867.037	97,34	90,69
2.	1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	2.781.983.000	2.777.976.232	99,71	99,05
3.	5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	20.202.178.000	18.997.352.546	96,02	86,29
4.	1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	15.983.242.000	15.572.633.757	98,04	99,83

Sumber: OM-SPAN Kemenkeu, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 29 dapat dijelaskan bahwa capaian serapan BBPPTP Surabaya dikelompokkan berdasarkan kegiatan utama adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan penyerapan anggaran sebesar 97,34% dan capaian fisik sebesar 100%.
b) Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan penyerapan anggaran sebesar 99,71% dan capaian fisik sebesar 100%.
c) Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan serapan anggaran sebesar 96,02% dan capaian fisik sebesar 100%.
d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BBPPTP Surabaya dengan penyerapan anggaran sebesar 98,04% dan capaian fisik sebesar 100%.

2. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Realisasi keuangan dan fisik kegiatan berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Serapan Dan Capaian Fisik Kegiatan BBPPTP Surabaya Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

Kode	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	8,957,516,000	8,719,079,543	**97.34**
52	Belanja Barang	57,665,098,000	55,471,921,334	**96.20**
53	Belanja Modal	5,281,639,000	5,213,716,291	**98.71**
	Total	71,904,253,000	**69,408,829,572**	**96.52**

Sumber: OM-SPAN Kemenkeu, 2022 (diolah)

Capaian serapan berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai terealisasi sebesar 97,34% dengan capaian fisik sebesar 100 %.
b) Belanja Barang terealisasi sebesar 96,20% dengan capaian fisik sebesar 100%.

c) Belanja Modal terealisasi sebesar 98,71% dengan capaian fisik sebesar 100%.

3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BBPPTP Surabaya

Realisasi Anggaran berdasarkan output kegiatan mencerminkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) prioritas utama BBPPTP Surabaya. Realisasi berdasarkan output Kegiatan secara terinci dijelaskan pada Lampiran 1.

Secara umum capaian output kegiatan BBPPTP Surabaya adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar yaitu:

1) Kawasan Kopi dengan serapan sebesar 97,10% dan capaian fisik 92,67%.

2) Kawasan Kakao dengan serapan sebesar 97,56% dan capaian fisik 96,19%.

3) Kawasan Kelapa dengan serapan sebesar 98,31% dan capaian fisik 92,47%.

4) Kawasan Jambu Mete dengan serapan sebesar 98,31% dan capaian fisik 81,43%.

b) Penguatan Perlindungan Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan antara lain yaitu:

1) Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan dengan serapan sebesar 99,19% dan capaian fisik 97,64%.

2) Perangkat Perlindungan Perkebunan dengan serapan sebesar 99,60% dan capaian fisik 100%.

3) Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan dengan serapan sebesar 99,60% dan capaian fisik 100%.

4) Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dengan serapan sebesar 99,98% dan capaian fisik 98,27%.

5) Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun dengan serapan sebesar 99,97% dan capaian fisik 99,34%.

6) Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 99,72% dan capaian fisik 99,06%.

c) Penguatan Perbenihan Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Penguatan Perbenihan Perkebunan yaitu:

1) Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan dengan serapan sebesar 95,03% dan capaian fisik sebesar 100%.

2) Pengujian Mutu Benih dengan serapan sebesar 95,03% dan capaian fisik sebesar 100%. 6.

3) Nursery dengan serapan sebesar 93,91% dan capaian fisik sebesar 100%.

d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BBPPTP Surabaya yaitu:

1) Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 97,07% dan capaian fisik 100%.

2) Layanan Umum dengan serapan sebesar 98,34% dan capaian fisik 100%.

3) Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan serapan sebesar 99,89% dan capaian fisik 100%.

4) Layanan Manajemen SDM dengan serapan sebesar 98,99% dan capaian fisik 100%.

5) Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan serapan sebesar 99,70% dan capaian fisik 100%.

6) Layanan Pemantauan dan Evaluasi Internal dengan serapan sebesar 99,20% dan capaian fisik 100%.

7) Layanan BMN dengan serapan sebesar 91,11% dan capaian fisik 100%.

8) Layanan Manajemen Keuangan dengan serapan sebesar 99,852% dan capaian fisik 100%.

e) Permasalahan Umum Realisasi Anggaran Tahun 2022

Permasalahan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan adalah sebagai berikut:

1) Adanya reorganisasi di lingkungan dinas berdampak terhadap terlambatnya proses pengajuan pelelangan barang dan jasa terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga proses pelelangan mengalami keterlambatan, dan pendistribusian benih oleh pihak ketiga kepada petani juga terlambat;

2) Masih banyak daerah yang lambat dalam hal proses verifikasi dan pengesahan SK CP-CL;

3) Pelaksanaan kontrak sebagian besar belum dilaksanakan sesuai komitmen yang telah disepakati;

4) Adanya dinamika dalam revisi anggaran (DIPA maupun POK) sampai dengan Triwulan ke-4 Tahun 2022;

5) Terjadinya perubahan baik lokasi maupun kelompok tani yang tidak dilaporkan;

6) Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawalan pengendalian OPT belum terkoordinir;

7) Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di ULP;

8) Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun;

9) Sistem pengadaan barang dan jasa dengan sistem satu pintu dan Keterbatasan SDM menyebabkan pelelangan kegiatan mengantri dan mengakibatkan pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan;

10) Pengawalan pelaksanaan kegiatan di daerah sulit dilaksanakan.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya merupakan laporan kinerja tahunan yang disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada tahun 2022.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada tahun 2022 mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsinya yaitu Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.

Realisasi penyerapan anggaran BBPPTP Surabaya sebagaimana yang tercatat pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp **69.408.829.572** dari total pagu anggaran sebesar Rp **71.904.253.000** atau mencapai **96,53%** dengan capaian fisik sebesar 96,03%, bahkan beberapa sasaran terwujud dengan capaian 100%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPPTP Surabaya pada tahun anggaran 2022 terlaksana dengan BAIK.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Anggaran BBPPTP Surabaya Tahun 2022

Kode	Pogram/Kegiatan/KRO/RO	Target		Realisasi		Pagu	Realisasi	
		Volume	Satuan	Volume	%	Anggaran	Keuangan	%
567338	**Kegiatan BBPPTP Surabaya**					**71.904.253.000**	**69.408.829.572**	**96.53**
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri					55,921,011,000	53,836,195,815	96.53
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar					32,936,850,000	32,060,867,037	97.34
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	5,320	Unit	4,955	93.15	32,936,850,000	32,060,867,037	97.34
1777.RAI.001	Kawasan Kopi	2,200	Ha	2,039	92.67	9,736,200,000	9,313,350,504	95.66
1777.RAI.001.054	Intensifikasi Tanaman Kopi					6,438,000,000	6,438,000,000	
1777.RAI.001.055	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan					743,200,000	743,200,000	
1777.RAI.002	Kawasan Kakao	500	Ha	481	96.19	7,175,700,000	7,001,996,043	97.58
1777.RAI.002.052	Peremajaan Tanaman kako					6,900,000,000	6,747,000,000	
1777.RAI.002.055	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan					275,700,000	254,996,043	
1777.RAI.005	Kawasan Kelapa	2,470	Ha	2,284	92.47	15,441,700,000	15,180,979,621	98.31
1777.RAI.005.051	Perluasan Tanaman Kelapa					10,602,344,000	10,593,018,500	
1777.RAI.005.052	Peremajaan Tanaman Kelapa					2,825,056,000	2,747,215,000	
1777.RAI.005.055	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan					2,014,300,000	1,840,746,121	

Kode	Pogram/Kegiatan/KRO/RO	Target		Realisasi		Pagu	Realisasi	
		Volume	Satuan	Volume	%	Anggaran	Keuangan	%
1777.RAI.007	Kawasan Jambu Mete	150	Ha	122	81.43	583,250,000	564,540,869	96.79
1777.RAI.007.052	Peremajaan Tanaman Jambu Mete					445,500,000	440,550,000	
1777.RAI.007.055	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan					137,750,000	123,990,869	
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan					2,781,983,000	2,777,976,232	99.86
1779.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4	Rekomendasi	4	97.64	160,349,000	159,047,672	99.19
1779.ABR.001.051	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan					160,349,000	159,047,672	
1779.ABR.001	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	4	Rekomendasi	4	97.64	160,349,000	159,047,672	99.19
1779.ABR.001.051	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan					160,349,000	159,047,672	
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3	Unit	3	100.00	398,250,000	396,641,636	99.60
1779.CAG.001	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan	1	Unit	1	100.00	49,700,000	49,630,000	
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	2	paket	2	100.00	348,550,000	347,011,636	

Kode	Pogram/Kegiatan/KRO/RO	Target		Realisasi		Pagu	Realisasi	
		Volume	Satuan	Volume	%	Anggaran	Keuangan	%
1779.PDC	Sertifikasi Produk	13	produk	13	98.27	1,629,209,000	1,628,890,624	99.98
1779.PDC.001.051	Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan					1,298,900,000	1,298,794,000	
1779.PDC.001.052	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan					330,309,000	330,096,624	
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	120	Unit	119	99.23	594,175,000	593,396,300	99.87
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	20	Ha	20	99.34	358,325,000	358,206,300	99.97
1779.RAI.001.051	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					324,725,000	324,703,300	
1779.RAI.001.054	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan					33,600,000	33,503,000	
1779.RAI.002	Area Penangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	100	Ha	99	99.06	235,850,000	235,190,000	99.72
1779.RAI.002.052	Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah					220,350,000	220,050,000	
1779.RAI.002.053	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan					15,500,000	15,140,000	
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan					20,202,178,000	18,997,352,546	94.04

Kode	Pogram/Kegiatan/KRO/RO	Target		Realisasi		Pagu	Realisasi	
		Volume	Satuan	Volume	%	Anggaran	Keuangan	%
5890.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	111,596,000	Batang	95,202,174	85.31	729,668,000	693,422,420	95.03
5890.BJA.002	Pengujian Mutu Benih	7,439,740	Batang	6,735,629	90.54	340,000,000	336,999,480	99.12
5890.RBK	**Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup**					19132510000	17966930646	93.91
5890.RBK.001	Nursery	7	Unit	6	83.04	19,132,510,000	17,966,930,646	93.91
5890.RBK.001.051	Pembangunan Nursery					9,995,905,000	9,673,782,867	
5890.RBK.001.052	Operasional Nursery					6,307,249,000	5,782,202,467	
5890.RBK.001.053	Produksi Benih					2,829,356,000	2,510,945,312	
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen					15,983,242,000	15,572,633,757	97.43
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan					15,983,242,000	15,572,633,757	97.43
1780.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	1	100.00	273,300,000	248,998,700	91.11
1780.EBA.956.052.A	Pengelolaan Aset BMN					273,300,000	248,998,700	
1780.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	1	100.00	1,993,512,000	1,960,385,242	98.34
1780.EBA.962.052.A	Administrasi Umum Perkantoran					533,000,000	529,568,390	
1780.EBA.962.052.B	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor					592,002,000	589,103,990	
1780.EBA.962.052.C	Fasilitasi Kunjungan Kerja / Pengawalan					289,000,000	288,123,665	

Kode	Pogram/Kegiatan/KRO/RO	Target		Realisasi		Pagu	Realisasi	
		Volume	Satuan	Volume	%	Anggaran	Keuangan	%
1780.EBA.962.052.D	Pembinaan Pegawai					74,700,000	73,841,960	
1780.EBA.962.052.F	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa					81,100,000	77,365,000	
1780.EBA.962.052.G	Induction Training / Koordinasi Internal Forum Komunikasi POPT					41,850,000	41,384,902	
1780.EBA.962.052.H	Induction Training / Koordinasi Internal Forum PBT					31,860,000	31,460,000	
1780.EBA.962.052.I	Akreditasi Laboratorium					124,800,000	106,809,666	
1780.EBA.962.052.J	Fasilitasi Pelayanan Publik					71,608,000	70,521,169	
1780.EBA.962.052.K	Penerimaan Negara Bukan Pajak					153,592,000	152,206,500	
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100.00	11,799,770,000	11,454,271,665	97.07
1780.EBA.994.001.A	Pembayaran gaji dan tunjangan					8,957,516,000	8,719,820,074	
1780.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					2,842,254,000	2,734,451,591	
1780.EBA.994.002.A	Honorarium Operasional Satuan Kerja					323,040,000	300,000,000	
1780.EBA.994.002.B	Honorarium Pegawai Tidak Tetap					975,000,000	937,500,000	
1780.EBA.994.002.C	Pemeliharaan dan Operasional					744,000,000	716,324,621	
1780.EBA.994.002.D	Biaya Operasional Kantor					800,214,000	780,626,970	
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	1	Unit	1	100.00	522,920,000	522,333,100	99.89

Kode	Pogram/Kegiatan/KRO/RO	Target		Realisasi		Pagu	Realisasi	
		Volume	Satuan	Volume	%	Anggaran	Keuangan	%
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal					522,920,000	522,333,100	
1780.EBB.951.054	Pengadaan Kendaraan Bermotor UPT Pusat					34,000,000	33,825,000	
1780.EBB.951.054.A	Pengadaan Kendaraan Dinas					34,000,000	33,825,000	
1780.EBB.951.056	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran UPT Pusat					488,920,000	488,508,100	
1780.EBB.951.056.A	Pengadaan Alat dan Meubelair Laboratorium					470,620,000	470,208,100	
1780.EBB.951.056.B	Pengadaan Meubelair Elektronik					18,300,000	18,300,000	
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM	149	Orang	147	98.66	408,200,000	404,079,468	98.99
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM					408,200,000	404,079,468	
1780.EBC.954.052	Pengelolaan Kepegawaian UPT Pusat					408,200,000	404,079,468	
1780.EBC.954.052.A	Administrasi Kepegawaian					85,600,000	85,322,488	
1780.EBC.954.052.B	Peningkatan Kapabilitas Pegawai					322,600,000	318,756,980	
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	1	100	584,140,000	583,208,888.00	99.84
1780.EBD.952.053	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran UPT Pusat					584,140,000	583,208,888	
1780.EBD.952.053.A	Fasilitasi Perencanaan					584,140,000	583,208,888	
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	1	100	221,400,000	219,618,044.00	99.20
1780.EBD.953.052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat					221,400,000	219,618,044	

Kode	Pogram/Kegiatan/KRO/RO	Target		Realisasi		Pagu	Realisasi	
		Volume	Satuan	Volume	%	Anggaran	Keuangan	%
1780.EBD.953.052.A	Pembinaan ULPPTP					51,000,000	50,548,000	
1780.EBD.953.052.B	Monev dan SPI					65,400,000	64,560,172	
1780.EBD.953.052.C	Publikasi dan Pameran					105,000,000	104,509,872	
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	1	100	180,000,000	179738650	99.85
1780.EBD.955.053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan UPT Pusat					180,000,000	179,738,650	
1780.EBD.955.053.A	Administrasi Keuangan					180,000,000	179,738,650	

Sumber: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kemenkeu, 2022

Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Uji Mutu APH

Pelaksanaan Kegiatan Uji Mutu APH

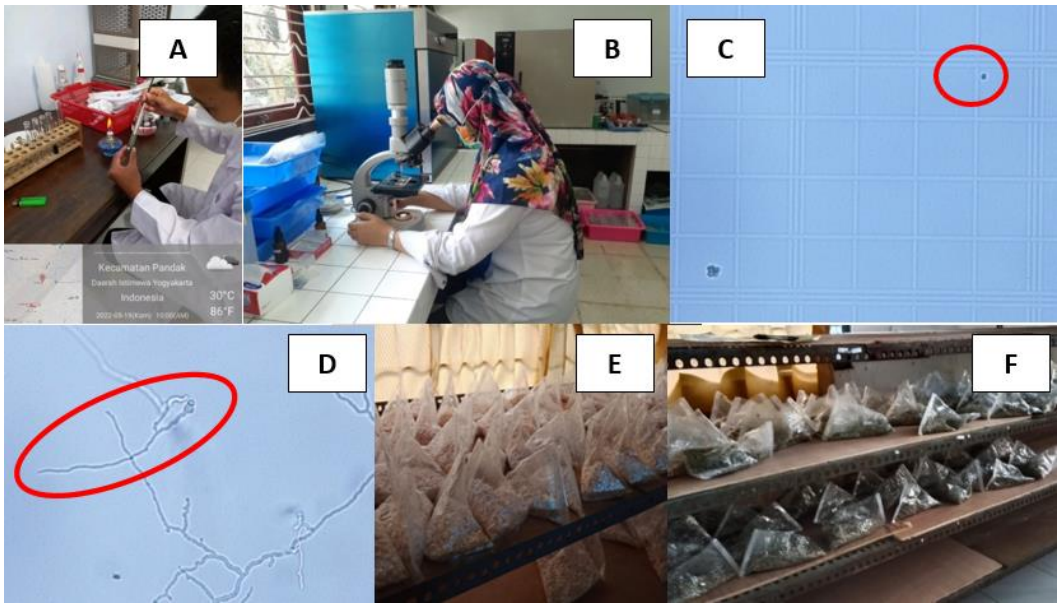

Keterangan Gambar:

A. Pelaksanaan uji mutu APH di LPHP Pandak Bantul, **B.** Pelaksanaan uji mutu APH di Balittas Malang, **C.** Spora jamur *Trichoderma* spp. pada bidang pandang *haemacytometer,* **D.** Perkecambahan spoa jamur *Trichoderma* spp., E. Perbanyakan Jamur *Beauveria bassiana*, dalam Media Jagung Giling di BPTPH Jawa Tengah, F. Perbanyakan Jamur *Metarhizium anisopliae* dalam Media Jagung Giling di BPTPH Jawa Tengah,

Pelaksanaan Kegiatan Uji Mutu APH

Keterangan Gambar:

G. Perbanyakan Jamur *Trichoderma* spp dalam Media Jagung Giling di BPTPH Jawa Tengah, **H.** Pengambilan contoh APH pada kegiatan *Quality Control* dan bimbingan teknis di BPP Jawa Barat, **I.** Pengambilan contoh APH pada kegiatan *Quality Control* dan bimbingan teknis di BPTP Daerah Istimewa Yogyakarta, **J.** Bimbingan Teknis dan Perbanyakan APH *Trichoderma* spp. dalam media PDA dan Beras di UPTD LPTP Bali.

Lampiran 3. Data Layanan Pengujian Mutu Formulasi Pestisida, Residu Pestisida dan Logam Berat Tahun 2022

Jenis		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pestisida	Uji lab bahan aktif pestisida (Metode LC) Hasil Pertanian	- 1 Bahan Aktif - 2 sampel	- 1 Bahan Aktif - 6 sampel	- 10 Sampel Kubis - 11 sampel kubis - 11 sampel tomat		- 5 Sampel Bawang Merah - 5 sampel Bawang Merah - 5 sampel tomat	- 19 Sampel		- 15 sampel tomat - 15 sampel cabai - 28 Sampel Bawang Merah	- 5 sampel tomat - 10 sampel Jeruk - 25 Sampel Bawang Merah	- 20 Sampel Bawang Merah - 15 Sampel Cabai - 5 Sampel Tomat		
	Pengujian Quality Control APH Gol Jamur			- 4 Sampel - 4 Sampel - 4 Sampel									
	Pengujian Quality Control APH Gol Bakteri								- 1 Sampel				
	Uji lab bahan aktif pestisida (Metode GC-MS)			- 3 Bahan Aktif - 7 sampel	- 5 Sampel	- 5 Sampel				- 20 sampel cabai - 12 Sampel Bawang Merah	- 5 Sampel Cabai - 5 Sampel Tomat		- 1 B.a. - 5 Sampel
	Pengujian Kadar Belum Aktif Pestisida			-2 Bahan Aktif - 2 Sampel									
	Pengujian sifat Fisikokimia Formula Kadar air pestisida (Metode Karl Fischer)			-2 Sampel									
	Pengujian sifat Fisikokimia Formula PH. Pestisida			-2 Sampel									
	Pengujian Lab Analisis Pestisida (Preparasi dan Screening dengan LC MS-MS)						- 1 Sampel			- 10 sampel cabai - 5 Sampel kubis - 5 Sampel Bawang Merah	- 40 Sampel Kubis	- 25 Sampel Kubis	
	Pengujian Lab Analisis Pestisida (Penetapan setelah screning)						-2 Bahan Aktif - 1 Sampel						
	Uji lab bahan Analisis Pestisida Kadar Bahan aktif pestisida						- 3 Sampel - 3 Bahan Aktif	- 4 Sampel - 2 Bahan Aktif	- 1 Sampel	- 2 Sampel Bawang merah	- 1 Sampel		- 5 Sampel
	Analisis Lab. Mikrobiologi jenis APH Mikoriza						- 9 Sampel	- 5 Sampel		- 2 Sampel	- 1 Sampel		
	Pengujian Lab. Parasitologi APH.											-2 Sampel	
Logam Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran 4. Data Layanan Penyediaan Isolat APH

Jenis APH		Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
		∑	Satuan	∑	Satuan	∑	Satuan	∑	Satuan	∑	Satuan	∑	Satuan	∑	Satuan	∑	Satuan	∑	Satuan	∑	Satuan	∑	Satuan	∑	Satuan
Jenis APH Jamur	Beauvaria sp.			-		1		10	tube	2	tube			6	tube	50	tube	2	tube	3	tube	12	tube	2	tube
	Metarhizium sp.			-						5	tube			4	tube										
	Tricoderma sp	6	tube	-		3	petri	14	tube	2	tube	12	tube	23	tube	64	tube	17	tube	13	tube	10	tube	64	tube
						4	tube																		
	Fusarium			-																					
	Gliocladium									3	tube														
Jenis APH Gol Bakteri	Pseudomonnas fluorescens	3	tube	-		2	tube			2	tube			4	tube	52	tube			7	tube	10	tube	2	tube
	Bacillus sp.			-										5	tube			4	tube	3	tube	20	tube		
	Coryne	4	tube	-		1	tube	4	tube			22	tube	6	tube	2	tube			4	tube				
	Serratia sp.	2	tube	-																2	tube				
	Ralstonia solani			-																					
	Streptomyces			-																					
Jenis APH Serangga	Trichogramma											9	tube												

Lampiran 5. Data Layanan Identifikasi OPT Dan Rekomendasi Pengendalian OPT

Bulan	No	Tanggal	Jenis Layanan	Nama Pemohon	Asal Pemohon	No. Form
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	1	25-05-2022	Saran Pengendalian OPT	Budiono	Kediri	16/05/2022
	2	25-05-2022	Saran Pengendalian OPT	Aris	Kediri	17/05/2022
Juni	1	27-06-2022	Saran Pengendalian OPT	Murtaji	Bojonegoro	18/06/2022
	2	27-06-2022	Saran Pengendalian OPT	Yahya	Bojonegoro	19/06/2022
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	1	11-08-2022	Saran Pengendalian OPT	Rusdiyanto	Gresik	23/08/2022
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	1	30-11-2022	Anjuran Teknis Pengendalian OPT	Sugeng Kaswati	Lumajang	30/11/2022
	2	30-11-2022	Anjuran Teknis Pengendalian OPT	Mislar	Lumajang	30/11/2022
Desember	-	-	-	-	-	-

Lampiran 6. Data Layanan Penyediaan Data dan Informasi OPT

Bulan	No.	Tanggal	Jenis Layanan	Nama Pemohon	Asal Pemohon	No. Form
Januari	1	24-01-2022	Informasi OPT	Annisa Dita	Universitas Trunojoyo	1/1/2022
Februari	2	07-02-2022	Informasi OPT	Halimatus Zahro	Sumenep	2/2/2022
Maret	3	02-03-2022	Informasi OPT	Risa Kumala	Universitas Kadiri	3/3/2022
	4	21-03-2022	Informasi OPT	Handono Ali	Universitas Kadiri	3/4/2022
	5	22-03-2022	Informasi OPT	M. Arzah Aryawan	Universitas Kadiri	3/5/2022
April	6	06-04-2022	Informasi OPT	Arfiani Nur S	Universitas Jember	4/6/2022
	7	07-04-2022	Informasi OPT	Putri Indah	Universitas Jember	4/7/2022
	8	08-04-2022	Informasi OPT	Fadhila Nur	Universitas Jember	4/8/2022
	9	18-04-2022	Informasi OPT	Hilda Arfiyani	Universitas Jember	4/9/2022
	10	26-04-2022	Informasi OPT	Hieronimus Satria	Universitas Jember	4/10/2022
Mei	11	10-05-2022	Informasi OPT	Silvia Oktavia	Universitas Jember	5/11/2022
	12	17-05-2022	Informasi OPT	Farah Emira	Universitas Jember	5/12/2022
	13	18-05-2022	Informasi OPT	Maisaroh	Universitas Jember	5/13/2022
	14	19-05-2022	Informasi OPT	M. Wafik A	Universitas Jember	5/14/2022
	15	24-05-2022	Informasi OPT	Rosita Dina	Universitas Jember	5/15/2022
Juni	-	-	-	-	-	-
Juli	16	18-07-2022	Informasi OPT	Basuki Rahmat	Bojonegoro	7/20/2022
	17	18-07-2022	Informasi OPT	Warsit	Bojonegoro	7/21/2022
Agustus	18	11-08-2022	Informasi OPT	Irawan	Gresik	8/22/2022
	19	16-08-2022	Informasi OPT	Iin Fujiwati	Universitas Negeri Sunan Ampel	8/24/2022
	20	25-08-2022	Informasi OPT	Rr. Ayu Diah	Universitas Negeri Sunan Ampel	8/25/2022
	21	26-08-2022	Informasi OPT	Arini Nurul M.	Universitas Negeri Sunan Ampel	8/26/2022
	22	30-08-2022	Informasi OPT	Laily Rachmawati	Universitas Negeri Sunan Ampel	8/27/2022
September	23	13-09-2022	Informasi OPT	Slamet Riadi	Kediri	9/28/2022
Oktober	24	06-10-2022	Informasi OPT	Matkari	Kediri	10/29/2022
November	-	-	-	-	-	-
Desember	25	02-12-2022	Informasi OPT	Yudo Bintoro	Sidoarjo	12/2/2022